

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
(LKj-IP SKPD)**



DISUSUN OLEH:

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025, disusun buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 yang sebelumnya di sebut LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sepanjang tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 berisi tentang gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2025 yang merupakan capaian kinerja Tahun 4 (Keempat) dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021- 2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi & Misi, serta tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya.

Praya, Januari 2026

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



H. MASNUN, S.Pd.M.Pd.
NIP. 19681231 199302 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Tugas dan Fungsi OPD	1
I.2 Data Kepegawaian	2
I.3 Struktur Organisasi SKPD.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	9
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	14
2.4 PERJANJIAN KINERJA PD TAHUN 2025	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja.....	18
3.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Kinerja Sasaran.....	18
3.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja.....	30
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	41
BAB IV PENUTUP.....	70
 LAMPIRAN :	
Dokumen – Dokumen Pendukung Pencapaian Target Kinerja,Pencapaian Sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
Daftar Prestasi/Piagam Penghargaan yang diperoleh PD Tahun 2025 Tabel Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menuju terwujudnya *Good Governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2025 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) Sasaran strategis, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan iktisar hasil (Outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing Indikator tiap Sasaran Strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)		Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri	0,09	0.05	%
	Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang ditangani	95	96,25	%
		Persentase Penanganan Korban Bencana	100	100	%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial.

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Sosial merupakan unsur yang menangani urusan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, memiliki peranan penting karena menyangkut penanganan kebutuhan dasar masyarakat yang menyanggah permasalahan kesejahteraan sosial(PMKS) .

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 77 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Sosial mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Fungsi Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Sosial

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Teknis dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang sosial;
- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2025 adalah sebanyak 106 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel .2
DATA PEGAWAI DINAS SOSIAL
s/d 31 Desember 2025 berdasarkan Jenis/Kualifikasi :

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 orang - 2 orang 1 orang -
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Perencana Ahli Muda b. Penyuluh Sosial Ahli Muda c. Pekerja Sosial Ahli Muda d. Pelaksana	1 orang 2 orang 1 orang 98 orang
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	1 orang 19 orang - -
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DI V d.DIII e. SMA sederajat f. Paket A	- 3 orang 46 orang 44 orang 13 orang -
5.	PNS	20 orang
6.	PPPK	86 orang
	JUMLAH	106 orang

Tabel. 3
DATA RINCIAN ASN (PNS,PPPK & PPPK PARUH WAKTU) PADA DINAS SOSIAL KAB.
LOTENG KEADAAN : 31 DESEMBER 2025

No	Nama	NIP	Gol.	Jabatan	Pendidikan	Status	Ket.
1	H. MASNUN, S.Pd.M.Pd.	196812311993021013	IV/c	Kepala Dinas	Megister (S2)	PNS	PNS :
2	L. M. ZAENUDDIN, SH	197012312001121009	III/d	Kabid. Rehabilitasi Sosial	SI	PNS	20 Orang
3	H. EDY SUPRIADI, S,IP, MH	198209252002121006	III/d	Kabid. Pemberdayaan Sosial	S2	PNS	
4	MUSYAHRAIN, S.Sos.	197007051992031011	III/d	Perencana Ahli Muda	SI	PNS	PPPK :
5	LALE MUSTIANAH, S.HI	197705082009012001	III/d	Kasubag. Umum Kepegawaian dan Keuangan	SI	PNS	9 Orang
6	BAIQ NUNUNG IZZATI, ST., M.PSSp.	198308282001122001	III/d	JF. Pekerja Sosial Ahli Muda	S2	PNS	
7	SEFTIA NURUL BAITI, S.Psi	198709222011012024	III/d	JF. Penyuluh Sosial Ahli Muda	SI	PNS	PPPK-PW :
8	TITIN PRIHATIN	197212271993032008	III/d	JF. Penyuluh Sosial Ahli Muda	SMA	PNS	77 Orang
9	LALU GUNAWAN, SE	197012312012121025	III/b	Pengelola Data dan Informasi	SI	PNS	

10	PALUPI ETIKA RINI, A.Md	197707032007012024	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	D3	PNS	Jumlah Total : 106 Org
11	BUSAIRI, SH	198105032008011025	III/c	Pengelola Data dan Informasi	SI	PNS	
12	MELIYANTI, S.Ak.	198408102011012019	III/b	Pengelola Data dan Informasi	SI	PNS	
13	MUHAMAD RAFI ALMALA, S.IP	198412052012121002	III/b	Pengelola Data dan Informasi	SI	PNS	
14	H. L. KASMASURYADI	197603112001121003	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	PNS	
15	LALU NIKMAN BATIN, SH	197411122009011003	III/a	Pengelola Data dan Informasi	SI	PNS	
16	AKHMAD.SUBAYAN NAZRI, S.Pd	197809142014071004	III/a	Pengelola Data dan Informasi	SI	PNS	
17	BAIQ NOVIA PUSPITA NORDIAYATI	198011182012122004	III/a	Pengelola Data dan Informasi	SMA	PNS	
18	PAJAR	196812312009011023	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	PNS	
19	LALU KASIRAN	197803102009011008	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	PNS	
20	RISMAN TAUFIK	197805022009011008	III/a	Pengelola Data dan Informasi	SMA	PNS	
21	BAIQ NARARIA FARLINA, S.Sos	198509262024212007	IX	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	S.1	PPPK	
22	AGUS SUCIPTO	197401132025211009	V	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	PPPK	
23	DIANA WATI	198302232025212018	V	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	PPPK	
24	ILHAMUDIN	198502202025211026	V	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	PPPK	
25	AGUS WIRAHADI KUSUMA	198408052025211025	V	Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK	
26	SERI HARI YANI	198703042025212028	V	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	PPPK	
27	ANISAH	198912312025212024	V	Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK	
28	JAELANI	199010092024211033	V	Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK	
29	BAIQ ROSDIANA	198710122025212024	V	Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK	
30	ABDUL AZIZ, S.Pd	199104282025211126		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
31	ABDUL RAHMAN, S.Pd. I	198912072025211125		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK . PW	
32	AHMAD ROZI	199901222025211042		Operator Layanan Operasional	SLTA	PPPK. PW	
33	AHMAD SARIPUDIN NUR, SH	199807292025211048		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
34	ARIF RAHMAN, ST	198712252025211123		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK . PW	
35	ASMAWATI, S.Pd	199604072025212140		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
36	BAGUS DIANDAR	199808282025211089		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK . PW	
37	BAIQ NONIQ RIA RISKI	199706182025212112		Operator Layanan Operasional	MA	PPPK . PW	
38	BAIQ YAMAN, S.Kom	198705152025212136		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
39	BASRI, S.Pd	199505272025211135		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK . PW	
40	BOHRI MUSLIM	198512022025211096		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK. PW	
41	DAMAN HURI, S.Pd	199212312025211168		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
42	DANA ASMARA	199112312025211232		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK . PW	
43	DARMAWAN, A.Md., Perp	198704202025211110		Pengelola Layanan Operasional	D3	PPPK. PW	
44	DELSA EPRILIA ERVATERA, SE	199604182025212100		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	

45	ELMIATI, S.Pd	199001022025212100		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK . PW	
46	EMILIA APRIANI, SM	199704152025212099		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
47	FAHRURROZI, S.Sos	199204052025211153		Penata Layanan Operasional	D.IV	PPPK . PW	
48	FIKRI AZIS	199506172025211115		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK . PW	
49	FIRMAN WIRAHADI	199504302025211096		Operator Layanan Operasional	MA	PPPK. PW	
50	GUSTI SEMPANE GARE, SH	199809122025211085		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK . PW	
51	HENDI YUDA WINATA	199708032025211083		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK. PW	
52	HERI PADLI	199612312025211177		Operator Layanan Operasional	MA	PPPK.	
53	HUSMAN	198108172025211157		Operator Layanan Operasional	SMU	PPPK. PW	
54	IHWAN ZUHRI	198906142025211137		Operator Layanan Operasional	MA	PPPK . PW	
55	IRHAM	197312312025211264		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK. PW	
56	JUNAIDI	196712312025211161		Operator Layanan Operasional	SMEA	PPPK . PW	
57	KARMILA	198611042025212071		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK . PW	
58	KARNO	198502192025211070		Operator Layanan Operasional	MA	PPPK. PW	
59	LAELATUL KHAERONI	199312182025212118		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK . PW	
60	LALU AKBAR IJAZI, SM	199511092025211075		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
61	LALU ANGGA WIRARAJA	199602122025211114		Operator Layanan Operasional	SMK	PPPK. PW	
62	LALU IRAWANDAR	198209122025211090		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK . PW	
63	LALU MUHLAS RAWI	199407182025211104		Operator Layanan Operasional	MA	PPPK. PW	
64	LALU RAMLI AHMAD, A.P. Par	198612312025211355		Operator Layanan Operasional	D.1	PPPK. PW	
65	LALU RAMLI AHMAD	198511182025211073		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK . PW	
66	LALU SADLI, ST	198512312025211298		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
67	LALU SUNTALA, S.Pd	198612052025211118		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK . PW	
68	LAYEK BUDIMAN	199202062025211121		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK . PW	
69	M. HERMANSYAH	199307292025211102		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK. PW	
70	MAHSUPRIADI	198705142025211120		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK . PW	
71	MARYAM, A.Md	198103112025212055		Pengelola Layanan Operasional	D3	PPPK. PW	
72	MASHUR, S.Sos	199010102025211213		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
73	MOHAMAD AZWAR HANAS, S.Pd	199104202025211142		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK . PW	
74	MUH. DANIAL, S.Pd	198912312025211267		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	

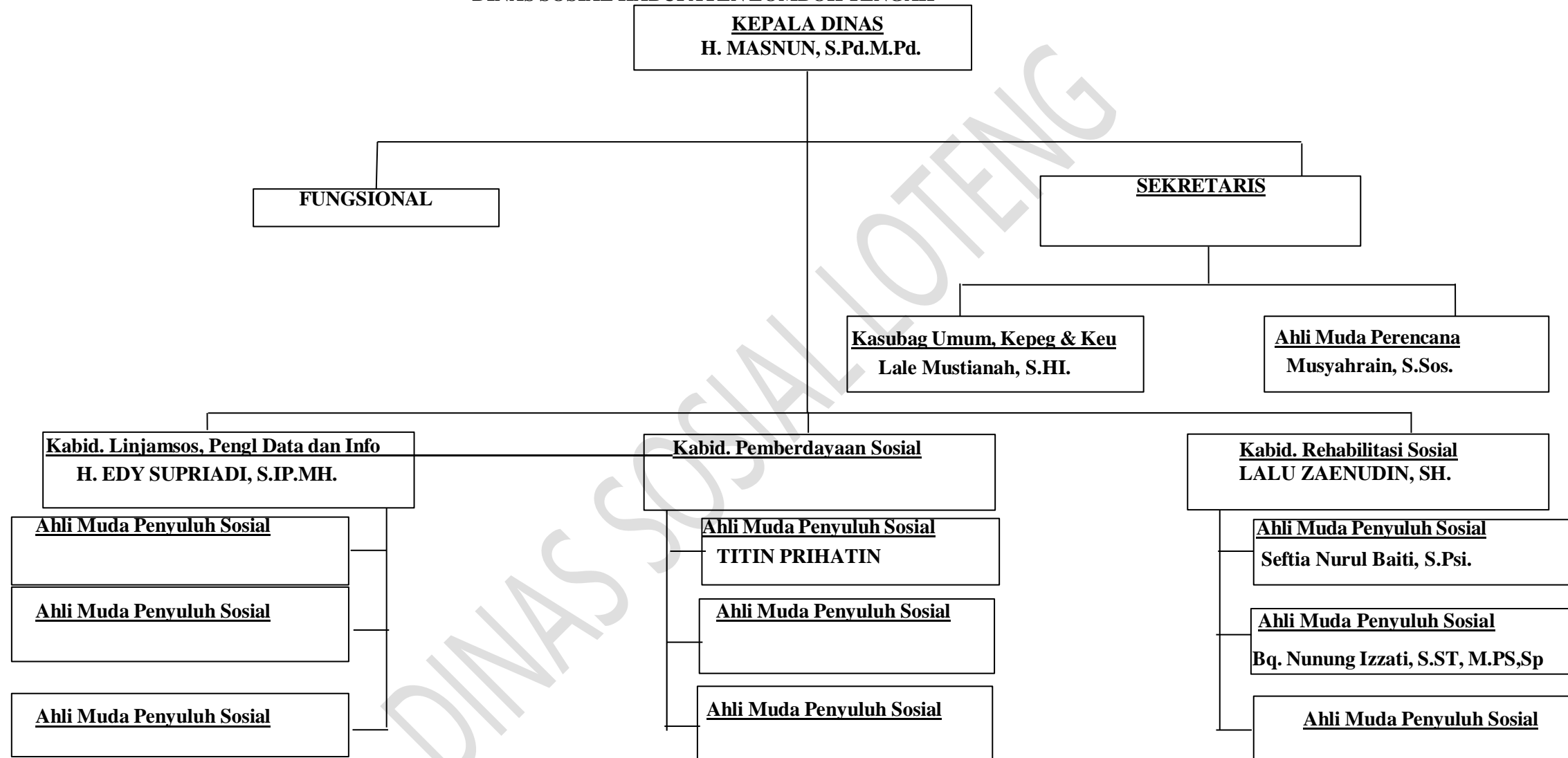
75	MUHAMAD FAUZAN AZIMA, S.Si	199306242025211122		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
76	MUHAMAD MAHDI, S.Sy	199303162025211123		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK .PW	
77	MUHAMAD SABRI, S.Pd	199204152025211141		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
78	MUHAMAD ZAINURI	198801082025211125		Operator Layanan Operasional	SMK	PPPK .PW	
79	MUHAMMAD MULTAZAM, S.Pd	199308262025211111		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK .PW	
80	MUHAMMAD YUSUF	199705052025211126		Operator Layanan Operasional	SMK	PPPK. PW	
81	MUHARIM, S.Pd	198605152025211166		Operator Layanan Operasional	MA	PPPK .PW	
82	MUHSIN, S.Pd	198912312025211363		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
83	MUKYAH	198212312025212119		Operator Layanan Operasional	SMK	PPPK. PW	
84	MUNDRI, SP	198707082025212106		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK .PW	
85	MUSTAMINUDDIN	199511122025211094		Operator Layanan Operasional	SMK	PPPK. PW	
86	NOVITA SUADIYATNO, A.Md	198211052025212076		Pengelola Layanan Operasional	D3	PPPK. PW	
87	NURUL HIDAYAH, SE	199312312025212223		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK .PW	
88	PEBRI MARTA SAPUTRA	199102072025211131		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK. PW	
89	REAGEN, S.Pd	197804042025211101		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK.	
90	ROBI KADRI SURYA A	199512312025211143		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK. PW	
91	SADYANA ILMA, S.Pd	199706192025212085		Penata Layanan Operasional	S.1	PPP. PW	
92	SAMIUN, S.HI	197912312025211225		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
93	SAMSUL WARDI	198409122025211111		Operator Layanan Operasional	MA	PPP. PW	
94	SANUSI	200010092025211046		Operator Layanan Operasional	MA	PPPK PW	
95	SAPARWADI, S.Pd. I	198612312025211281		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
96	SAPOAN, S.Pd	198911052025211137		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK .PW	
97	SARTIKA HENDRIANI, SE	199503132025212130		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
98	SATRIA WANDI RANGGA PRATAMA, SP	199506052025211142		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
99	SITI NURHIDAYATI	198912312025212290		Operator Layanan Operasional	SLTA	PPPK PW	
100	SOLEHAH	198912262025212092		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK. PW	
101	SUHADI, S.Kep., Nes	199006042025211137		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK. PW	
102	SUJARMAN, S.Kom	198912312025211330		Penata Layanan Operasional	S.1	PPPK .PW	
103	WIRANTANUS	198512132025211073		Operator Layanan Operasional	SMA	PPPK. PW	
104	ZAINAL ABIDIN	199105212025211132		Operator Layanan Operasional	MA	PPPK .PW	
105	ZAINAL ARIFIN	199512312025211183		Operator Layanan Operasional	SLTA	PPPK .PW	
106	ZUHDI	197912312025211216		Operator Layanan Operasional	SLTA	PPPK. PW	

Berdasarkan tabel 2 dan 3 diatas, maka SDM/Personil pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah yaitu berjumlah 106 ASN yang terdiri dari PNS 20 orang dan PPPK sebanyak 86 orang. Ada 2 Jabatan Struktural yang kosong yaitu Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, sementara ada 6 Jabatan Fungsional yang kosong yaitu Penyuluh Sosial yang menangani Bencana, Penyuluh Sosial yang menangani Data dan Penyuluh Sosial yang Menangani Bansos di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penyuluh Sosial yang menangani Kemiskinan, Penyuluh Sosial yang menangani PSKS Perorangan/Kelembagaan di Bidang Pemberdayaan Sosial serta Penyuluh Sosial yang menangani RTS pada Bidang Rehabilitasi Sosial . dengan adanya tambahan ASN PPPK sebanyak 86 orang akan mempermudah dan membantu dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kab. Loteng yang semakin meningkat.

1.3 Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Merawat ahlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Mencapai sumber daya manusia yang cerdas, mandiri dan unggul;
- 3) Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih;
- 4) Pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas;
- 5) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, mendukung Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian Misi ke-4 yaitu ”Pembangunan ekonomi yang berkeselimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas”.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten *Lombok Tengah*. Renstra Dinas Sosial 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten *Lombok Tengah*

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan isu utama permasalahan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun Rumusan Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan uraian diatas maka **Tujuan** yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun kedepan yaitu :
 “ *Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* “

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah: ” *Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS* ”

MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH BERDASARKAN RENSTRA SKPD TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi PPKS	Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang ditangani	Penyediaan data, Kerjasama penanganan PPKS dengan pemerintah, Instansi terkait, dunia usaha dan Masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial dan Program Penanganan Bencana	Urusan Sosial
		Persentase Penanganan Korban Bencana	Penyediaan Logistik bencana yang memadai, Peningkatan Kapasitas Tenaga Penanggulangan Bencana	Program Penanganan Bencana	Urusan Sosial
Meningkatnya Kapasitas Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Publik	Tertatanya Administrasi Perkantoran	Kinerja Perangkat Daerah	Penataan Administrasi SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Rutin Kesekretariatan SKPD
	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai		Pengadaan Sarana dan Prasarana		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel		Meningkatnya Capaian Kinerja SKPD		

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai Kegiatan Tahunan. Berikut Rencana Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2025 sbb :

Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi PPKS	Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri	0,09%
Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang ditangani	95%
Meningkatnya pemberdayaan Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana	100%
Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PSKS yang dibina	86,43%
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	78,12%
Meningkatnya Perlindungan sosial korban Bencana	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	730 orang
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100%
	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang mendapatkan pemeliharaan dan pengamanan	1 TMPNK

2.2.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	KET.
1	2		3	12
1	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.525.330.451,39	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.909.137	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.524.944	
1.1.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.234.798	
1.1.3.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.763.846	
1.1.4.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.999.843	
1.1.5.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.999.843	
1.1.6.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.548.805	
1.1.7.	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.217.000	
1.1.8.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.620.058	

1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.748.480.244,39	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.731.137.815,39	
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.742.290	
1.2.3.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12.600.139	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	354.943.473	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332.379.077	
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.750.000	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.762.000	
1.3.4.	Sub Kegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.052.396	
1.4.	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.696.000	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.696.000	
1.5.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.658.630	
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	62.664.486	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.994.144	
1.6.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.642.967	
1.6.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.539.660	
1.6.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000	
1.6.3.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.353.307	
2.	Program	Program Pemberdayaan Sosial	845.946.012,10	
2.1.	Kegiatan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.468.815	
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5.468.815	
		BELANJA OPERASI	5.468.815	
2.2.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	840.477.197,10	
2.2.1.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.603.503	

2.2.2.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	33.167.864,10	
2.2.3.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	801.705.830	
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1.463.470.387	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	390.858.090	
3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	111.997.714	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	7.260.590	
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	78.030.151	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	183.580.091	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9.989.544	
3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.072.612.297	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	673.138.839	
3.2.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	263.135.318	
3.2.3.	Sub Kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	136.338.140	
4.	Program	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.709.333.309	
4.1.	Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.709.333.309	
4.1.1.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	657.952.438	
4.1.2.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.026.357.327	
4.1.3.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	25.023.544	

5.	Program	Program Penanganan Bencana	170.727.670	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	139.992.316	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	139.992.316	
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	30.735.354	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	30.735.354	
6.	Program	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	161.690.715	
6.1.	Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	161.690.715	
6.1.1	Sub Kegiatan	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	149.234.813	
6.1.2	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12.455.902	
		JUMLAH	7.876.498.544,49	

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KAB. LOMBOK TENGAH

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja Sasaran Tahun					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
I	Tujuan											
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PPKS Graduasi mandiri}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100$	Bidang Linjamsos dan Bidang Dayasos	Bidang Linjamsos dan Bidang Dayasos	1.05%	0.06%	0.07%	0.08%	0.09%	0.10%	1.45%
II	Sasaran											
1	Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah PPKS Yang ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100$	Bidang Rehsos, Bidang Linjamsos dan Bidang Dayasos	Bidang Rehsos, Bidang Linjamsos dan Bidang Dayasos	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
		Persentase Penanganan Korban Bencana	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana alam yang ditangani}}{\text{Jumlah Korban Bencana}} \times 100$	Bidang Linjamsos	Bidang Linjamsos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Definisi Operasioanl :

1. PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,kesulitan atau gangguan, tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.
2. Graduasi Mandiri adalah Berakhirnya kepesertaan KPM karena kondisi sosial ekonomi yg sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial
3. Pelayanan Sosial adalah suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan- kebutuhannya, sehingga mereka dapat berkembang dan mereka bisa mendapatkan sebuah perlindungan.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian hartabenda, dan dampak psikologis.
5. Penanganan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
6. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya
7. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kebakaran, konflik sosial dan teror
8. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana

2.4 PERJANJIAN KINERJA PD TAHUN 2025

Visi : Perumusan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Visi&Misi Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 yaitu : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”**

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 5 (lima) kata kunci, yaitu:

- kata **‘beriman’** berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata **‘sejahtera’** berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata **‘bermutu’** berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.
- Kata **‘Maju’** berarti memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- Kata **‘Berbudaya’** berarti prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (The Heart of Lombok)

Dari penjabaran Visi Misi tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Lombok merumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Sosial yang selanjutnya dituangkan kedalam dalam Renstra SKPD Tahun 2021-2026

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan tahun keempat Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2025 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai

berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ket
Meningkatnya Kualitas Penanganan Bagi PPKS		<i>Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri</i>	0,09 %	Urusan Sosial
	Meningkatnya Pelayanan Sosial Bagi PPKS	<i>Persentase PPKS yang ditangani</i>	95 %	Urusan Sosial
		<i>Persentase Penanganan Korban Bencana</i>	100 %	Urusan Sosial

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. **7.876.498,544,49,-** (*Tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah empat puluh sembilan sen*).dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 7.590.995.000,- (*Tujuh milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) ada kenaikan/ tambahan anggaran sebesar Rp. 285.503.544,49,- (3,62%)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Dinas Sosial Kab.Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	< 50%	Sangat Rendah
2	51% < 65%	Rendah
3	66% < 75%	Sedang
4	76% < 90%	Tinggi
5	91% < 100%	Sangat Tinggi

Sumber: Peraturan Bupati Loteng Nomor 84 Tahun 2024

3.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Kinerja Sasaran

Skala Nilai Peringkat Kinerja Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi PPKS		Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri	%	0,09	0,05	55,55
		Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase PPKS yang ditangani	%	95	96,25	101,31
			Persentase Penanganan Korban Bencana	%	100	100	100

Sumber Data Dinas Sosial Kab.Loteng s.d bulan Desember 2025

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) Tujuan dengan 1(satu) indikator dan 1 (satu) sasaran yang terbagi dalam 2 (dua) indikator. Pada tahun 2025, capaian Indikator tujuan Persentase PPKS yang Graduasi mandiri dengan target 0.09% terealisasi sebesar 0,05% dengan capaian kinerja sebesar 55,55%, sementara capaian indikator sasaran persentase PPKS yang ditangani dengan target 95% terealisasi sebesar 96,25% dengan capaian kinerja sebesar 101,31%. Dan Capaian Indikator *Persentase Penanganan Korban Bencana* dengan target tahun 2025 adalah 100% terealisasi sebesar 100%

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut Tujuan dan sasaran strategis, yaitu: Tolok ukur capaian Tujuan berupa Meningkatnya Kualitas Penanganan PPKS dan sasaran Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS yang ditangani, masing-masing diukur dengan 1 (satu) dan 2(dua) indikator. Indikator tersebut yaitu indicator Tujuan dan indicator sasaran. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Formulasi Indikator
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan PPKS		<i>Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri</i>	$\frac{\text{Jumlah PPKS Graduasi Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100$
		Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS	<i>Persentase PPKS yang ditangani</i>	$\frac{\text{Jumlah PPKS Yang di tangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100$
			<i>Persentase Penanganan Korban Bencana</i>	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana alam yang d tangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100$

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.Loteng s.d bulan Desember 2025

1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 2024

Realisasi kinerja Tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kab.Lombok Tengah pada tahun 2024 dan 2025 untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Penanganan PPKS dengan indicator *Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri* dan sasaran Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS dengan indikator *Persentase PPKS yang ditangani* dan indicator *Persentase Penanganan korban Bencana* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No.	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Realisasi 2024 (Tahun sebelumnya)	2025			Target Akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1.	<i>Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri</i>		0,11%	0,09%	0,05%	55,55%	0,10%
		<i>Persentase PPKS yang ditangani</i>	94,25%	95%	96,25%	101,31%	100%
		<i>Persentase Penanganan Korban Bencana</i>	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data :Dinas Sosial Kab.Loteng s.d bulan Desember 2025

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kab.Loteng pada Tahun 2025 dapat diketahui bahwa Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Penanganan bagi PPKS dan Sasaran Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS dengan Indikator Tujuan *Persentase PPKS yang Graduasi Mandiri* dan indicator sasaran *Persentase PPKS yang ditangani* dan *Persentase Penanganan Korban Bencana* pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menghasilkan *Capaian Kinerja. 85,62 % dengan kriteria Tinggi, sementara Tahun 2024 Capaian Kinerja 114,07% % dengan kriteria Sangat Tinggi.*

2. Penjelasan masing-masing indikator tujuan dan sasaran

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

2.1. Indikator Tujuan : Persentase Graduasi Mandiri

Target Capaian Indikator Tujuan : Persentase Graduasi Mandiri PMKS Tahun 2025 sebesar 0,09%. dengan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 0,05%

a. Pengertian Indikator dan Manfaat indicator

Pengertian dari indicator tujuan : Graduasi mandiri adalah berakhirnya kepesertaan PPKS dikarenakan kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapat bantuan sosial. dengan kriteria yang sudah ditentukan dari Kemensos RI yaitu :

1. KPM secara sadar dan sukarela menyatakan keluar dari kepesertaan PKH karena merasa sudah mampu.
2. KPM menolak bantuan karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bansos lagi
3. KPM Ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain
4. KPM mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik(termasuk sebagai ASN)
5. KPM Memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan sukses
6. KPM memperoleh harta kekayaan tertentu

Dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan indicator Tujuan Persentase PPKS yang graduasi mandiri yaitu KPM yang memperoleh manfaat dari Program Bantuan Tahun 2025. Adapun manfaat dari indicator tersebut yaitu untuk mengetahui persentase KPM graduasi mandiri yang di lakukan terhadap PPKS sesuai RPJMD tahun 2025 yang telah di tetapkan.

Perbandingan capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 dengan capaian kinerja 114,07% (Kriteria sangat tinggi) dibandingkan dengan Tahun 2025 dengan capaian kinerja 85,62% (Kriteria Tinggi) ini disebabkan capaian kinerja pada Tujuan strategis belum mencapai target seperti yang diinginkan yaitu indikator tujuan persentase PPKS yang graduasi mandiri yang ditargetkan 0.09% sementara realisasi kinerja 0.05%. faktor penghambat realisasi ini terjadi dikarenakan Kendala utama pendamping PKH dalam mendorong graduasi mandiri KPM (Keluarga Penerima Manfaat) meliputi ketergantungan psikologis dan ekonomi KPM yang tinggi, kurangnya motivasi untuk mandiri, serta ketakutan kehilangan bantuan. Faktor lainnya adalah rendahnya kapasitas SDM KPM (pendidikan/keterampilan), penyalahgunaan dana bantuan, serta terbatasnya akses usaha.

Berikut adalah kendala yang dihadapi pendamping PKH terhadap graduasi mandiri:

- Faktor Internal KPM (Mentalitas dan Ketergantungan): Banyak KPM merasa nyaman dengan bantuan dan memiliki mentalitas ketergantungan, sehingga enggan mandiri. KPM sering takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan sosial.
- Keterbatasan Keterampilan dan Sumber Daya: KPM seringkali memiliki tingkat pendidikan rendah dan minim keterampilan wirausaha, sehingga sulit meningkatkan pendapatan secara mandiri.
- Partisipasi Rendah dan Ketidakhadiran: Rendahnya kehadiran atau partisipasi pasif KPM dalam pertemuan kelompok (P2K2) menghambat proses edukasi untuk kemandirian.
- Penyalahgunaan Dana Bantuan: Dana bantuan seringkali digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau membayar hutang, bukan untuk modal usaha produktif.
- Faktor Eksternal dan Lingkungan: Terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah pedesaan, serta kurangnya modal sosial atau dukungan lingkungan untuk mendukung usaha mandiri.
- Kekhawatiran Konflik Sosial: Pendamping sering merasa sungkan atau khawatir menimbulkan konflik di masyarakat jika memaksa KPM yang sebenarnya mampu untuk graduasi.
- Upaya pendampingan sering terfokus pada administrasi pencairan, sehingga penguatan kapasitas ekonomi (pemberdayaan) untuk memotivasi graduasi mandiri kurang maksimal.

Tabel 3.5. DATA KPM GRADUASI MANDIRI PROGRAM PKH

NO	NAMA KPM	NIK	KK	ALASAN GRADUASI	KECAMATAN	NAMA PENDAMPING
1	RIANI	5202074107830523	5202072702080336	SUDAH SEJAHTERA, ART MEMILIKI UPAH DI ATAS UMR	janapria	SITI ARPIANTI
2	HUSNAWATI	5202074107770714	5202071201081849	ART MENDAPTKAN SERTIFIKASI, MEMILIKI SAPI, SAWAH	janapria	SITI ARPIANTI
3	SUHAENI	5202074107910418	5202072702080326	SEJAHTERA, MEMILIKI MOBI, MOTOR, SAWAH	janapria	SITI ARPIANTI
4	ABDURRAHMAN	5202071210600001	5202071201081039	MEMILIKI USAHA JAHIT, SAWAH, MOBIL, MOTOR	janapria	SITI ARPIANTI
5	ZULANWAR ANAS	5202071011800007	5202072104120047	SUDAH SEJAHTERA, MEMILIKI SAWAH DAN MASIH KERJA DI LUAR NEGERI JADI TKI	janapria	HAERIYAH,SE
6	HAERIAH	5202077112840050	5202071105110038	sudah sejahtera secara ekonomi & kepala keluarga menjadi kepala wilayah	janapria	MUHASNIAN TI
7	KAMALUDIN	5202073112700154	5202070901082096	sudah sejahtera secara ekonomi & memiliki usaha sembako	janapria	MUHASNIANTI
8	MURNIATI	5202027112910065	5202020705130007	Memberikan kesempatan yg lbih layak	Jonggat	ABDUL GAFFAR
9	AMILUDIN	5202023112820269	5202021802083800	sudah ada usaha yg berjalan	Jonggat	ABDUL GAFFAR
10	HERMANDALA	5202023112840099	5202022501110300	Sudah memiliki usha tetap	Jonggat	ABDUL GAFFAR
11	MULIATI	5202025708720002	5202022605100010	Memberikan kesempatan yg lbih layak	Jonggat	ABDUL GAFFAR
12	SUANDRI ERWIN	5202022503890002	5202020111160003	Sudah memiliki penghasilan tetap	Jonggat	ABDUL GAFFAR
13	MENAH	5202025505810003	5202021802080177	Sudah memiliki usaha tetap	Jonggat	ABDUL GAFFAR
14	SAENUN	5202026003660001	5202020607190002	Memberikan kesempatan yg lbih layak	Jonggat	ABDUL GAFFAR
15	MUTTAH	5202027112870062	5202021802084724	Sudah memiliki penghasilan tetap	Jonggat	ABDUL GAFFAR
16	ANISAH	5202027112840002	5202022805130013	Memberikan kesempatan yg lbih layak	Jonggat	ABDUL GAFFAR

17	RUKYAH	5202026605880001	5202021302100011	Sudah mempunyai usaha tetap	Jonggat	ABDUL GAFFAR
18	MIJIATI	5202026104740001	5202021902080890	Memiliki usaha sedang berjalan	Jonggat	ABDUL GAFFAR
19	HUSNUL ANITA	5202025205850003	5202021902080893	Sudah mempunyai penghasilan tetap	Jonggat	ABDUL GAFFAR
20	RATIAH	5202024107740390		TERDAPAT ASN DALAM KK (TNI)	Jonggat	MUTMAINAH
21	BAIQ YOPI YANTINI	5202044906890005	5202020207120004	SUDAH SEJAHTERA (SUAMI TUKANG LAS/BENKEL)	Jonggat	MUTMAINAH
22	SITI SERIBANUN	5202026410810002	5202022701110058	SERTIFIKASI DAN INPASING	Jonggat	MUTMAINAH
23	HURIAH	5202027112580078	5202020202110038	SUAMI PNS	Jonggat	MUTMAINAH
24	NUR AINI	5202027112830086	5202021902083157	SERTIFIKASI DAN INPASING	Jonggat	MUTMAINAH
25	SERIATI	5202024303850001	5202022002080786	SUDAH SEJAHTERA (SUAMI BUAT LEMARI)	Jonggat	MUTMAINAH
26	HASAN	5202023112570126	5202023112070261	Sudah memiliki usaha	Jonggat	YULIANA
27	PARIDAH	5202024107700005	5202023112070401	Sudah memiliki usaha	Jonggat	YULIANA
28	NURHAYATI	5202014107800948	5202010510100002	sudah mapan karna memiliki usaha, merupakan kpm lebih dari 5 tahun	Praya	Baiq Fifi Octari Yustania
29	HJ. SULIYAH	5202015808750001	5202012401080790	sudah mapan dan memiliki usaha kelontong dan buah, merupakan kpm lebih dari 5 tahun	Praya	Baiq Fifi Octari Yustania
30	ZAENAB	5202016603800003	5202010504100011	sudah mapan dan memiliki usaha, merupakan kpm lebih dari 5 tahun	Praya	Baiq Fifi Octari Yustania
31	RUKIYATI	5202014107870835	5202010903100029	sudah mapan dan memiliki usaha bakso cilok dan minuman, merupakan kpm lebih dari 5 tahun	Praya	Baiq Fifi Octari Yustania
32	NURHASANAH	5202014101800005	5202012401080777	sudah mapan dan memiliki usaha nasi bungkus, merupakan kpm lebih dari 5 tahun	Praya	Baiq Fifi Octari Yustania
33	HERNAWATI	5202014107860649	5202012301083706	sudah mapan dan memiliki usaha penjual ayam kota, merupakan kpm kurang lebih dari 5 tahun	Praya	Baiq Fifi Octari Yustania
34	ABDUL HAFIZ	5202010107801004	5202012303110089	sudah mapan dan memiliki usaha penjual ayam kota, merupakan kpm kurang lebih dari 5 tahun	Praya	Baiq Fifi Octari Yustania

35	MARHAMAH	5202014107860663	5202012303110028	sudah mapan dan memiliki usaha lapak minuman, merupakan kpm lebih dari 5 tahun	Praya	Baiq Fifi Octari Yustania
36	ERNI CAHYATI	5202014604770002	5202012301083083	sudah mapan dan memiliki usaha jual beli ternak, merupakan kpm	Praya	Baiq Fifi Octari Yustania
37	WAHIDAH	5202015910850002	5202012301083688	sedah sejahtera dan memiliki beberapa aset tanah dan merukan KPM lebih dari 5 tahun	Praya	Baiq Fifi Octari Yustania
38	SOPIATUN	5202017112560111	5202012401080551	sudah mapan dan memiliki usaha pengrajin tusuk sate, merupakan kpm lebih dari 5 tahun	Praya	Baiq Fifi Octari Yustania
39	ISKANDAR	5202011803950003	5202011807180008	sudah mandiri dan memiliki beberapa aset berupa tanah	Praya	Baiq Fifi Octari Yustania
40	SAKDIYAH	5202084311890001		sejahtera	pringgarata	Muhamad taher
41	Sri Yopi Azmi	5202086305940002		sejahtera	pringgarata	Muhamad taher
42	AHMAD SUHENDRA	5202121201920002		SEJAHTERA	BATUKLIANG UTARA	MUSLIMIN
43	MIARIM	5202054107890403		SEJAHTERA	PRAYA BARAT	HABIBULAH
44	L.AGUS BUDIAWAN	5202100908820001		SEJAHTERA	PRAYA TENGAH	MATLA'ULIANAH
45	ISTIKAMAH	5202085288500006		SEJAHTERA	PRINGGARATA	TRIYANA SULIYANTI
46	ITA PURNAMASARI	5201034107960260		SEJAHTERA	PRINGGARATA	TRIYANA SULIYANTI
47	MASTUNAH	5202124107950183		SEJAHTERA	PRINGGARATA	TRIYANA SULIYANTI
48	RAHMAWATI	5202080807830002		SEJAHTERA	PRINGGARATA	TRIYANA SULIYANTI
49	RONI	5202087112810065		SEJAHTERA	PRINGGARATA	TRIYANA SULIYANTI
50	MARNI	5202047112800545		SEJAHTERA	PUJUT	BAIQ WARDANIAH

51	RENI HANDAYANI	5202044806900002		SEJAHTERA	PUJUT	BAIQ WARDANIA H
52	ASMIAN I AGUSTU N	5202045508880001		SEJAHTERA	PUJUT	SRI SUKMAWATI
53	SURYADI	5202040911860001		SEJAHTERA	PUJUT	SRI SUKMAWATI
54	REME	5202047112820320		SEJAHTERA	PUJUT	HUSWATU N HASANAH
55	SARIM	5202047112820291		SEJAHTERA	PUJUT	HUSWATU N HASANAH
56	AYUMIN	5202044112860002		SEJAHTERA	PUJUT	HUSWATUN HASANAH
57	MUSLIHAN	5202047112740196		SEJAHTERA	PUJUT	HUSWATU N HASANAH
58	RINAH	5202044107750691		SEJAHTERA	PUJUT	HUSWATU N HASANAH
59	ATHAN HIDAYAT	5202042508900001		SEJAHTERA	PUJUT	LADEBBHI AYU M
60	PIAH HAYATI	5202045005850005		SEJAHTERA	PUJUT	LADEBBHI AYU M
61	MANIM	5202047112880351		SEJAHTERA	PUJUT	WAWA MARETA TAHUNA SEPA
62	NURIMIN	5202047112800448		SEJAHTERA	PUJUT	MITA ANDRIANI
63	RENI CHUSTANIA	5202021510187003		SEJAHTERA	PRAYA	JULIAS IS MAYA GI
64	SITI PARHAEN	5271025903950003		SEJAHTERA	PRAYA	JULIAS IS MAYA GI
65	SITI ZAETUN	5202014405740002		SEJAHTERA	PRAYA	JULIAS IS MAYA GI
66	SUPRIANAH	5202016409730002		SEJAHTERA	PRAYA	JULIAS IS MAYA GI
67	ZAHARIAH	520201410880005		SEJAHTERA	PRAYA	JULIAS IS MAYA GI

2.2. Indikator Sasaran 1 ; Persentase PPKS yang ditangani

Target Capaian Indikator Sasaran 1 : Persentase PPKS yang ditangani sebesar 95% pada tahun 2025 sedangkan Capaian Indikator Persentase PPKS yang ditangani Tahun 2025 sebesar 96,25%

Penjelasan Indikator Sasaran nomor 1 (satu), yaitu : **“Persentase PPKS yang ditangani”** adalah ;

2.2.1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator

Pengertian dari Indikator Sasaran No. 1 , Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,, kesulitan atau gangguan, tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PPKS terdapat 26 jenis PPKS.

Dari pengeritian PPKS diatas, yang dimaksud dengan indikator Sasaran No 1. :’ Persentase PPKS yang ditangani ’ yaitu Persentase PPKS yang mendapatkan layanan dan bantuan pada Tahun 2025 di bandingkan dengan total jumlah data PPKS hasil verifikasi Data PPKS Tahun 2025. Adapun manfaat dari indikator tersebut yaitu untuk mengetahui persentase Pembinaan/Penanganan yang dilakukan terhadap PPKS sesuai dengan target RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

2.2.2. Metode/ Teknik/Rumus untuk menghitung /mengukur Pencapaian Indicator

Adapun metode /teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menghitung jumlah PPKS yang ditangani pada tahun 2025 yang baik yang sumber dana APBN, APBD I dan APBD II atau Sumber Dana Lainnya Kemudian dibagi dengan jumlah total data PPKS yang ada berdasarkan hasil verifikasi pendataan PPKS Tahun 2025.

2.2.3 Sumber Data /referensi yang digunakan untuk menghitung /mengukur pencapaian indikator. Sumber data / referensi yang digunakan untuk menghitung pencapaian indicator yaitu dengan menggunakan sumber data hasil pelaksanaan program kegiatan terkait penanganan PPKS yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

Tabel. 3.5.

DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL(PPKS) TAHUN 2025

No.	Jenis PMKS	Jumlah (org/K K)	Ket.
1	2	3	4
1	Anak Balita Terlantar	21	
2	Anak Terlantar	6.030	
3	Anak Nakal/Anak Berhadapan dengan Hukum	5	
4	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah	15	
5	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus(AMPK)	45	
6	Lanjut Usia Terlantar	6.352	
7	Penyandang Disabilitas	2.082	
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan(BWBLP)	130	
9	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	
10	Pekerja Migran Bermasalah Sosial(PMBS)	7	
11	Korban Bencana Alam	573	
12	Korban Bencana Sosial	10	
13	Wanita Rawan Sosial Ekonomi(WRSE)	393	
14	Keluarga Fakir Miskin	110.031	
	Jumlah	125.694	

Sumber Data : Bidang Linjamsos, Bidang Rehsos dan Bidang Dayasos

DINAS SOSIAL LOTENG

Tabel. 3.6.
DATA PPKS YANG DITANGANI TAHUN 2025

No.	Kegiatan/Jenis PMKS	Sumber Dana				Jumlah	Ket.
		APB D II	APB D I	APBN	LAIN-2		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas	93	-	602	-	695	
2	Bantuan Sandang bagi Penyandang Disabilitas	10	-	79	-	89	
3	Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	10	-	-	55	65	
4	Bantuan Penyediaan Perbekalan Kesehatan(P3K) bagi Penyandang Disabilitas	3	-	-	-	3	
5	Bantuan Pemberdayaan berupa modal usaha bagi Penyandang Disabilitas	10	-	22	-	32	
6	Bantuan Permakanan bagi Anak Terlantar	93	-	1,968	-	2,061	
7	Bantuan Sandang bagi Anak Terlantar	26	-	37	-	63	
8	Bantuan Penyediaan Perbekalan Kesehatan(P3K) bagi Anak Terlantar	-	-	37	-	37	
9	Bantuan Pemberdayaan berupa modal usaha bagi Anak Terlantar	25	-	-	-	25	
10	Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia Terlantar	93	-	490	-	583	
11	Bantuan Sandang bagi Lanjut Usia Terlantar	-	-	50	-	50	
12	Bantuan Penyediaan Perbekalan Kesehatan(P3K) bagi Lanjut Usia Terlantar	3	-	-	-	3	
13	Fasilitasi Adminduk Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA bagi Lanjut Usia Terlantar	10	-	-	-	10	
14	Bantuan Pemberdayaan berupa modal usaha bagi Gelandangan dan Pengemis	-	-	10	-	10	
15	Bantuan Modal Usaha bagi WRSE	50	-	-	-	50	
16	Penanganan Kasus bagi korban Tindak Kekerasan dan PMKS lainnya	86	-	-	-	86	
17	Bantuan Permakanan/Sembako bagi korban Tindak Kekerasan dan PMKS lainnya(Penjangkauan)	523	-	-	-	523	
18	Penanganan Warga Negara Migran Yang bermasalah Sosial(PMBS)	7	-	-	-	7	
19	KPM yang mendapatkan Bansos BPNT	-	-	63,440	-	63,440	
20	KPM yang mendapatkan Bansos PKH	-	-	46,591	-	46,591	

21	KPM yang mendapatkan Bansos BLT DBH-CHT	348	-	-	-	348	
22	KPM yang mendapatkan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RUTILAHU)	360	-	-	-	360	
23	KPM yang mendapatkan Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu(RST)	-	-	18	-	18	
24	KPM mendapatkan Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE)	-	-	2	-	2	
25	KPM yang mendapat bantuan KUBe/UEP	-	-	20	-	20	
26	Penyelesaian Reaktifasi BPJS(rekomendasi) bagi Keluarga Miskin			4,384		4,384	
27	Penyelesaian rekomendasi KIP- K bagi Keluarga Miskin			841		841	
28	Bantuan bagi Korban Bencana Alam	573				573	
29	Bantuan bagi Korban Bencana sosial	10				10	
	JUMLAH	2,333		118,5G1	55	120,G7G	

Sumber Data : Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Linjamsos dan Bidang Dayasos

2.2.4. Pendukung /penghambat pencapaian target indikator pada Tahun 2025

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Indikator yaitu peran aktif OPD dalam berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Dinsos Prov. NTB serta dukungan Stake holder lainnya dalam upaya penanganan permasalahan permasalahan sosial yang ada di Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Sosial mendapatkan berbagai Program Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS yang Sumber Pendanaanya berasal dari APBN, APBD I, APBD II atau Sumber Dana Lainnya.

2.3. Indikator Sasaran 2 yaitu “ Persentase Penanganan Korban Bencana”

Target Capaian Indikator Persentase Penanganan Bencana pada Tahun 2025 sebesar :100 %, sedangkan Capaian Indikator Persentase Penanganan Bencana pada Tahun 2025 sebesar 100%

Penjelasan Indikator Sasaran 2 tersebut adalah :

2.3.1. Pengertian Indikator dan Manfaat Indikator

Persentase penanganan korban bencana adalah sebagai berikut berdasarkan PP No. 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana :

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Penanganan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- c. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya
- d. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kebakaran, konflik sosial
- e. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana

2.3.2. Metode/teknik/rumus untuk mengukur pencapaian Indikator

Metode yang digunakan yaitu dengan cara melakukan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menghitung jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani dibagi jumlah korban bencana dikali 100

2.3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung/mengukur pencapaian indicator adalah dengan menggunakan sumber data laporan kejadian bencana selama tahun 2025 pada bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun Data kejadian dan korban bencana yang ditangani, ada di tabel 3.7. berikut ini :

DATA KEJADIAN DAN KORBAN BENCANA YANG MENDAPATKAN BANTUAN TAHUN 2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Kategori Bantuan					Keterangan
						Permakanaan	Sandan g	Tempat Penampungan Pengungsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dukung a n Psikososial	
1.	Praya Timur	Jero Puri	120	1 Januari 2025	Banjir	120	5	11	5	-	APBD /APBN
2.	Praya Timur	Beleke	25	3 Januari 2025	Banjir	25	5	-	4	-	APBD /APBN
3.	Praya Timur	Beleke	11	3 Januari 2025	Banjir	11	2	-	3	-	APBD /APBN
4.	Praya Timur	Bilelendo	42	12 Pebruari 2025	Banjir	42	-	-	-	-	APBD
5.	Praya Timur	Kidang	64	12 Pebruari 2025	Banjir	64	-	-	-	-	APBD
6.	Pujut	Bangkat Parak	76	12 Pebruari 2025	Banjir	76	-	-	-	-	APBD
7.	Batukliang	Barabali	4	27 Maret 2025	Putting Beliung	4	-	-	-	-	APBD
8.	Batukliang	Selebung	15	27 Maret 2025	Putting Beliung	15	-	-	-	-	APBD
9.	Jonggat	Ubung	10	9 April 2025	Putting Beliung	10	-	-	-	-	APBD
10.	Pringgarata	Taman Indah	25	10 April 2025	Putting Beliung	25	-	-	-	-	APBD
11.	Praya Barat	Tanak Rarang	29	10 April 2025	Banjir	29	-	-	-	-	APBD
12.	Praya	Kelurahan Panjkisari	120	19 Mei 2025	Banjir	120	-	-	-	-	APBD
13.	Jonggat	Ubung	3	20 Mei 2025	Banjir	3	-	-	-	-	APBD
14.	Praya	Kelurahan Tiwugalih	7	20 Mei 2025	Putting Beliung	7	-	-	-	-	APBD
15.	Praya	Bunut Baik	3	20 Mei 2025	Putting Beliung	-	-	-	-	-	APBD
16.	Praya Timur	Marong	2	27 Mei 2025	Putting Beliung	2	-	-	-	-	
17.	Batukliang Utara	Tanak Beak	4	4 Agustus 2025	Kebakaraan	4	-	-	-	-	
18.	Batukliang	Lendang Tempel	6	4 Oktober 2025	Kebakaraan	6	2	2	2	-	APBD /APBN
19.	Praya Barat Daya	Seraga	14	21 Oktober 2025	Putting Beliung	14	-	-	-	-	
20.	Jonggat	Ubung	3	25 November 2025	Putting Beliung	3	-	-	-	-	
Jumlah			583			583	14	13	14	-	

Sumber Data : Bidang Linjamsos

2.3.4. Pendukung /penghambat pencapaian target indikator pada Tahun 2025

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Indikator yaitu peran serta semua stake holder/pemangku kepentingan dalam penanganan bencana baik dari segi koordinasi maupun dalam ketersediaan logistic bencana.

3.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja

Capaian Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing Bidang Tahun 2025 sbb:

@ *BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL*

- Program Keluarga Harapan(PKH); yang mendapatkan Bansos PKH sebanyak 46.591 KPM
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai(BLT) dari DBH-CHT untuk 348 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp.626.400.000,-
- Penerima Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu(RST) sebanyak 21 KPM dari APBN
- Penerima bantuan modal usaha Program Pahlawan Ekonomi Nusantara(PENA) sebanyak 67 KPM
- Pemberian bantuan bagi korban bencana sebanyak 583 jiwa berupa permakanan dan sandang
- **Pelayanan kepada Masyarakat terkait dengan :**
 - @ Pemberian Rekomendasi BPJS/Pengaktifan BPJS PBI yang tidak aktif sebanyak 4.384 orang
 - @ Pemberian Rekomendasi Surat Keterangan KIP Kuliah sebanyak 841 Orang

@ *BIDANG REHABILITASI SOSIAL*

- Pemberian Permakanan pada Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar sebanyak 3.339 orang yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN.
- Pemberian Permakanan pada PMKS lainnya (Penjangkauan) sebanyak 523 orang dengan nilai bantuan sebesar Rp. 156.656.430,-
- Pemberian Alat Bantu bagi 65 Penyandang Disabilitas berupa Kursi Roda, Tongkat Ketiak dan Alat Bantu Dengar yang bersumber dari APBD dan BAZDA Loteng
- Pemberian Paket Usaha Sembako bagi 50 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi(WRSE) dengan nilai bantuan sebesar Rp. 83.604.100,-
- **Pelayanan kepada Masyarakat terkait dengan :**
 - @ Pemberian Rekomendasi bagi calon orang tua asuh(COTA) 6 Dokumen
 - @ Penanganan kasus yang terkait dengan anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi dll yang ditangani melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif(PKSAI) sebanyak 86 kasus

@ *BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL*

- Pemberian Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 110.031 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp. 264.074.400.000,-
- Pelaksanaan Musdes dan Muskel dalam verval Data DTKS sebanyak 110 Desa/Kelurahan dari 154 Desa/Kelurahan di Kab. Lombok Tengah.
- Pemberian Bantuan Hibah Uang Kepada 24 Lembaga/yayasan dengan nilai bantuan sebesar Rp. 720.000.000,- (@ Rp.30.000.000,-)
- Pengelolaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) melalui Aplikasi SIKS-NG sampai dengan Tanggal 20 Januari 2026; Jumlah DTSN yaitu 1.112.491 orang/Individu atau 370.657 KPM/Keluarga
- **Pelayanan kepada masyarakat terkait dengan**
 - : @ Pemberian Surat Tanda Terdaftar LKS 6
 - LKS @ Surat Ijin Operasional LKS 5 LKS
 - @ Rekomendasi ijin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 5 Dokumen

PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI :

No	PERMASALAHAN/KENDALA	SOLUSI	KETERANGAN
1.	Kurangnya Sumber Daya Manusia berupa Penyuluh Sosial/Pekerja Sosial sebagai pelaksana teknis kegiatan	Mengajukan Pelaksanaan Ujian Kompetensi (UKOM) ke Kemensos RI Cq. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional III Yogyakarta	Untuk mengisi kekosongan/Slot Peksos/Pensos yang belum terisi
2.	Banyaknya kasus yang terkait dengan anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi dll yang membutuhkan Rumah Singgah / Shelter untuk penampungan sementara dalam penanganan kasus tersebut, sementara Kab.Loteng belum memiliki Rumah Singgah/Shelter	Sudah bersurat ke Bupati Loteng Cq. Sekretaris Daerah Kab.Loteng	Sampai saat ini belum ada petunjuk/tanggapan
3.	Keterbatasan anggaran untuk pemberdayaan Keluarga Miskin melalui KUBE/UEP	Mengajukan Anggaran Ke TAPD/BANGGAR terkait KUBE/UEP atau Crosscutting dengan Stakeholder lainnya	Peningkatan Pendapatan bagi Keluarga Miskin
4.	Perlu penguatan Sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik dengan menyediakan anggaran yang memadai	Mengajukan Anggaran Ke TAPD/BANGGAR terkait penguatan SARPRAS PELAYANAN PUBLIK	Penataan Ruang dan pengadaan/penyediaan perlengkapan serta peralatan pelayanan publik sementara kondisi saat ini belum memadai

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah Daerah

Tabel 3.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi periode RPJMD 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Target Dinsos	Realisasi Dinsos	Target RPJMD	Realisasi RPJMD
1.	Persentase PPKS yang ditangani	95 %	96,25 %	78,12 %	100 %
2.	Persentase Penanganan Korban Bencana	100%	100%	100 %	100%

Sumber Data : Dinsos s.d Bulan Desember 2025

Dari data diatas, untuk realisasi capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2025 untuk indikator sasaran 1 : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mencapai 101,31% sementara terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) mencapai 128,00% sedangkan indikator sasaran 2 Persentase Penanganan Korban Bencana baik realisasi capaian kinerja Dinas Sosial maupun terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) mencapai 100 % ini disebabkan kondisi bencana alam maupun sosial di Kabupaten Lombok Tengah masih dalam skala kecil sehingga untuk distribusi bantuan baik logistic maupun sumber daya lain pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana dapat tertangani.

3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Sejenis

Dinas Sosial Provinsi NTB mempunyai Indikator Sasaran 1 yaitu Persentase Cakupan PPKS yang ditangani dengan realisasi capaian kinerja 100% dan Indikator Sasaran 2 Persentase Penanganan Korban Bencana dengan realisasi capaian kinerja 100%. Perbandingan target yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi NTB dimana perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5.2 Perbandingan Target dan Realisasi Dinas Sosial Provinsi NTB

No	Indikator Sasaran	Target Dinsos NTB	Realisasi Dinsos NTB	Realisasi Kinerja
1.	Persentase Cakupan PPKS	100%	100%	100 %
2.	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 %	100%	100 %

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi NTB s.d Bulan Desember 2025

Angka kemiskinan merupakan isu Internasional maupun nasional, terkait hal itu Pemerintah baik pusat maupun Daerah menerapkan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan dengan melaksanakan 3 strategi yaitu

1. Mengurangi/menurunkan pengeluaran penduduk miskin dengan pola pemberian bantuan sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya.
2. Meningkatkan Pendapatan penduduk miskin berupa pemberdayaan baik lewat Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomis Produktif (UEP), Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan lainnya
3. Mengurangi Kantong-kantong kemiskinan dengan pola penataan lingkungan baik rumah, fasilitas umum, sanitasi dan lainnya.

Di bawah ini Data Perbandingan Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi NTB dan Kab. Loteng sebagai berikut :

Tabel 3.5.3 Perbandingan Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi NTB dan Kab. Loteng

No.	Daerah/Kemiskinan	Satuan	Kemiskinan/Tahun				Ket.
			2022	2023	2024	2025	
A.	Kab. Loteng						
	Jumlah Penduduk Miskin	Orang/ Jiwa	131.940	128.890	129.740	109,250	Maret 2025
	Persentase Penduduk Miskin	%	13,44	12,89	12,24	10,68	
B.	Provinsi NTB						
	Jumlah Penduduk Miskin	Orang/ Jiwa	746.660	731.940	751.230	637,180	September 2025
	Persentase Penduduk Miskin	%	14,14	13,68	13,85	11,38	
C.	Nasional						
	Jumlah Penduduk Miskin	Orang/ Jiwa	27,54 Juta	26,16 Juta	25,90 Juta	23,36 Juta	September 2025
	Persentase Penduduk Miskin	%	10,14	9,54	9,35	8,25	

Sumber Data : BPS Tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025

3.6. Kolaborasi Lintas Sektor Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Dalam upaya mewujudkan target capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase PPKS yang ditangani dan Persentase Penanganan korban Bencana, Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah Tahun 2025, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berupa layanan, dan rujukan penanganan kasus-kasus anak dan Gepeng yang melibatkan instansi terkait Kepolisian, DP3AP2KB, Dikes, Dukcapil, Rumah Sakit LPAI, Diknas, POLPP, dan Peksos yang tertangani lewat wadah PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif). Adapun Kasus yang terkait dengan anak dan lainnya yang tertangani Tahun 2025 sesuai data dari Bidang Rehabilitasi Sosial sejumlah 86 Kasus.

Tabel 3.5.4. Data Penanganan Kasus - kasus Tahun 2025

No.	Spesifikasi Kasus	Penyelesaian Kasus	Alamat		Jumlah
			Kecamatan	Desa	
1	2	3	4	5	6
1.	Penemuan Bayi Terlantar	Rujukan ke sentra Paramitha dan sudah mendapatkan COTA (Calon Orang Tua Asuh)	Kopang	Kopang Rembiga	1
				Muncan	1
			Pringgarata	Bagu	1
			Jonggat	Puyung	1
			Praya	Prapen	1
			Praya Barat daya	Darek	1
2.	Anak Terlantar	Pendampingan Sosial Penguatan terhadap korban	Praya	Jago	1
			Pujut	Tanak Awu	3
			Jonggat	Gemel	1
			Praya Timur	Sukaraja	1
				Ganti	1
			Praya Barat	Mangkung	3
			Kopang	Kopang Rembiga	1
				Muncan	1
			Praya	Prapen	1
				Gerunung	1
			Pringgarata	Bagu	1
3.	Anak Rentan	Pendampingan Sosial dan Mendapatkan Atensi dari sentra Paramita	Jonggat	Bonjeruk	1
			Praya	Renteng	1
			Praya Barat	Batujai	4
4.	Korban Persetubuhan	Penguatan terhadap korban dan pelaku telah diproses hukum	Jonggat	Jelantik	4
				Puyung	2
				Ubung	1
				Gemel	1
				Pengenjek	3
				Bonjeruk	1
			Batuklinag	Pagutan	2
			BKU	Aik Bukak	1
				Aik Darek	1
				Tanak Beak	1
			Pujut	Mertak	1
				Sengkol	1
			Praya	Jago	4
				Gonjak	2

				Montong Terep	1
				Renteng	1
			Praya Barat	Kateng	1
				Batujai	1
			Praya Timur	Sengkerang	2
			Praya Tengah	Lajut	2
				Jurang Jaler	1
			Janapria	janapria	2
				krembong	1
				satuta	1
			Kopang	Lendang are	1
				Kopang rembiga	1
				Montong Gamang	1
				Darmaji	1
			Pringgarata	Pringgarata	1
5.	Korban Percabulan	Penguatan terhadap korban dan pelaku telah diproses hukum	Pujut	Mertak	2
			Jonggat	Ubung	1
			BKU	Setiling	2
			Praya Timur	Kidang	2
			Praya Barat Daya	Darek	1
6.	Korban Kekerasan Fisik	Penguatan terhadap korban dan pelaku telah diproses hukum	Jonggat	Gemel	1
			Praya tengah	Gerantung	1
			Praya Timur	Semoyang	1
			Praya Barat daya	Teduh	1
7.	Korban Kekerasan Verbal	Penguatan terhadap korban dan pelaku telah diproses hukum	Praya	Montong Terep	1
8.	Korban Pornografi	Penguatan terhadap korban dan pelaku telah diproses hukum	Jonggat	Sukarara	1
9.	Saksi Kekerasan Fisik	Pendampingan BAP dan Penguatan terhadap Korban	Praya Barat	Penujak	1
10.	Saksi Pencurian	Pendampingan BAP dan Penguatan Terhadap korban	Jonngat	Pengenjek	1
			Praya Timur	Leneng	1
			Prabarda	Darek	1
				MT ajan	1
JUMLAH					86

Sedangkan terkait penanganan bencana tetap berkoordinasi/berkolaborasi dengan BPBD Kab.Loteng, sementara itu untuk mendukung penanggulangan kemiskinan sebagai crosscutting Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Lombok Tengah mempunyai Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni(RUTILAHU) kepada Keluarga Miskin sebagai bentuk strategi dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan, Berdasarkan data dibawah ini ada penurunan dari tahun – tahun terhadap Keluarga Penerima manfaat Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.5.5. Data Keluarga Miskin Penerima Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Tahun 2023 ,2024 dan 2025

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2023	618	Unit
2.	2024	134	Unit
3.	2025	360	Unit
	Jumlah	1.112	Unit

Sumber Data : Dinas Perkim Kab.Loteng Tahun 2023 ,2024 dan 2025

Tabel 3.5.6. Data Keluarga Miskin Penerima Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Tahun 2025 Di Kab. LOMBOK TENGAH

No.	Kecamatan	Jumlah (Unit)	Keterangan
1.	Praya Barat	20	Peningkatan Kualitas (Rp. 20.000.000/Unit)
2.	Praya Barat Daya	24	Peningkatan Kualitas (Rp. 20.000.000/Unit)
3.	Praya Timur	28	Peningkatan Kualitas (Rp. 20.000.000/Unit)
4.	Pujut	38	Peningkatan Kualitas (Rp. 20.000.000/Unit)
	Pujut	1	Korban Bencana/Rusak Ringan (Rp. 15.000.000/Unit)
	Pujut	1	Korban Bencana/Rusak Sedang (Rp. 30.000.000/Unit)
5.	Batukliang	32	Peningkatan Kualitas (Rp. 20.000.000/Unit)
6.	Batukliang Utara	16	Peningkatan Kualitas (Rp. 20.000.000/Unit)
7.	Kopang	31	Peningkatan Kualitas (Rp. 20.000.000/Unit)
	Kopang	1	Pembangunan Baru (Rp. 35.000.000/Unit)
8.	Pringgarata	25	Peningkatan Kualitas (Rp. 20.000.000/Unit)
9.	Janapria	32	Peningkatan Kualitas (Rp. 20.000.000/Unit)
10.	Jonggat	30	Peningkatan Kualitas (Rp. 20.000.000/Unit)
	Jonggat	1	Korban Bencana/Rusak Ringan (Rp. 15.000.000/Unit)
11.	Praya	49	Peningkatan Kualitas (Rp. 20.000.000/Unit)
	Praya	2	Pembangunan Baru (Rp. 35.000.000/Unit)
	Praya	1	Korban Bencana/Rusak Sedang (Rp. 30.000.000/Unit)
12.	Praya Tengah	26	Peningkatan Kualitas (Rp. 20.000.000/Unit)
	Praya Tengah	2	Pembangunan Baru (Rp. 35.000.000/Unit)
	Jumlah	360	Unit

3.7. Inovasi Yang Telah dilaksanakan :

Untuk mendapatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) yang valid terhadap Calon Keluarga Penerima Manfaat(KPM) baik Pengusulan, Penonaktifan dan yang mendapatkan Bantuan Sosial(Bansos), Dinas Sosial mempunyai usulan/gagasan untuk melakukan Musyawarah Dusun(Musdus)/Musyawarah Lingkungan(Musling) dan mendapat dukungan/sambutan yang baik dari Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada saat Rapat kerja terkait program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, namun kondisi anggaran dan Sumber Daya Manusia(SDM) pada Dinas Sosial yang belum memadai, usulan ini ditunda sementara waktu.untuk dilaksanakan, dikarenakan juga jumlah Dusun dan Lingkungan yang banyak sejumlah 1.054 (BPS Tahun 2016)

yang harus melaksanakan Musyawarah Dusun(Musdus)/Musyawarah Lingkungan(Musling) sehingga memerlukan dana operasional yang memadai serta SDM yang melaksanakan kegiatan tersebut harus banyak, sementara jumlah Aparatur Sipil Negara(ASN) yang ada pada Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah sangat terbatas. Walaupun Musdus/Musling belum dilaksanakan, Dinas Sosial tetap mengintensifkan melaksanakan Musdes/muskel dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan

kualitas pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) yang tahun-tahun sebelumnya belum maksimal.

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan Musdes dan Muskel sebanyak 110 kali pada Desa dan Kelurahan di 12 Kecamatan. Sementara ada 44 Desa yang belum melaksanakan Musdes pada 9 Kecamatan.

Tabel 3.5.6. Data Desa dan Kelurahan yang sudah melaksanakan Musdes/Muskel Tahun 2025

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Sumber Dana	KET
1	Mekar Sari	Praya Barat	APBD	sudah
2	Mangkung	Praya Barat	APBD	Sudah
3	TanakRarang	Praya Barat	APBD	Sudah
4	Bonder	Praya Barat	APBD	Sudah
5	Labulia	Jonggat	APBD	sudah
6	Sukarara	Jonggat	APBD	sudah
7	Puyung	Jonggat	APBD	sudah
8	Gemel	Jonggat	APBD	sudah
9	Bunkate	Jonggat	APBD	sudah
10	Barejulat	Jonggat	APBD	sudah
11	Nyerot	Jonggat	APBD	sudah
12	Batutulis	Jonggat	APBD	sudah
13	Jelantik	Jonggat	APBD	sudah
14	Perina	Jonggat	APBD	sudah
15	Pengenjek	Jonggat	APBD	sudah
16	Ubung	Jonggat	APBD	sudah
17	Bonjeruk	Jonggat	APBD	sudah
18	Bangket Parak	Pujut	APBD	sudah
19	Kawo	Pujut	APBD	sudah
20	Segala Anyar	Pujut	APBD	sudah
21	Gapura	Pujut	APBD	sudah
22	Rembitan	Pujut	APBD	sudah
23	Kuta	Pujut	APBD	sudah
24	Mertak	Pujut	APBD	sudah
25	Sengkol	Pujut	APBD	sudah
26	Ketara	Pujut	APBD	sudah
27	Tanak Awu	Pujut	APBD	sudah
28	Pengembur	Pujut	APBD	sudah
29	Tumpak	Pujut	APBD	sudah
30	Prabu	Pujut	APBD	sudah
31	BDesa ilebante	Pringgarata	APBD	sudah
32	Desa Bagu	Pringgarata	APBD	sudah
33	Desa Menemeng	Pringgarata	APBD	sudah
34	Desa Sisik	Pringgarata	APBD	sudah
35	Desa Sintung	Pringgarata	APBD	sudah
36	Desa Arjangke	Pringgarata	APBD	sudah
37	Desa Pringgarata	Pringgarata	APBD	sudah
38	Desa Taman Indah	Pringgarata	APBD	sudah
39	Desa Murbaya	Pringgarata	APBD	sudah
40	Desa Sepakek	Pringgarata	APBD	sudah
41	Desa Pemepek	Pringgarata	APBD	sudah
42	Desa Ganti	Praya Timur	APBD	sudah

43	Desa Beleka	Praya Timur	APBD	sudah
44	Desa Kidang	Praya Timur	APBD	Sudah
45	Desa Landah	Praya Timur	APBD	Sudah
46	Desa Sengkerang	Praya Timur	APBD	Sudah
47	Desa Sukaraja	Praya Timur	APBD	Sudah
48	Desa Mujur	Praya Timur	APBD	Sudah
49	Desa Beleke Daya	Praya Timur	APBD	sudah
50	Desa Beleke Lebe Sene	Praya Timur	APBD	sudah
51	Desa Pengonak	Praya Timur	APBD	sudah
52	Darek	Praya Barat Daya	APBD	sudah
53	Ungga	Praya Barat Daya	APBD	sudah
54	Kabul	Praya Barat Daya	APBD	sudah
55	Batu Jangkih	Praya Barat Daya	APBD	sudah
56	Montong Ajan	Praya Barat Daya	APBD	sudah
57	Pelambik	Praya Barat Daya	APBD	sudah
58	Pandan Tinggang	Praya Barat Daya	APBD	sudah
59	Loang Maka	Janapria	APBD	sudah
60	Prako	Janapria	APBD	sudah
61	Lingkok Berenge	Janapria	APBD	sudah
62	Tibu Sisok	Janapria	APBD	sudah
63	Beber	Batukliang	APBD	sudah
64	Aik Dareq	Batukliang	APBD	sudah
65	Mekar Bersatu	Batukliang	APBD	sudah
66	Mantang	Batukliang	APBD	sudah
67	Peresak	Batukliang	APBD	sudah
68	Selebung	Batukliang	APBD	sudah
69	Pagutan	Batukliang	APBD	sudah
70	Lendang Tampil	Batukliang	APBD	sudah
71	Pengadang	Praya Tengah	APBD	sudah
72	JurangJaler	Praya Tengah	APBD	sudah
73	PraiMeke	Praya Tengah	APBD	sudah
74	Beraim	Praya Tengah	APBD	sudah
75	Dakung	Praya Tengah	APBD	sudah
76	Kelebu	Praya Tengah	APBD	sudah
77	Batunyala	Praya Tengah	APBD	sudah
78	Pejanggik	Praya Tengah	APBD	sudah
79	Lajut	Praya Tengah	APBD	sudah
80	Jontlak	Praya Tengah	APBD	sudah
81	Gerantung	Praya Tengah	APBD	sudah
82	Lelong	Praya Tengah	APBD	sudah
83	Sasake	Praya Tengah	APBD	sudah
84	Panji Sari	Praya	APBD	sudah
85	Leneng	Praya	APBD	sudah
86	Renteng	Praya	APBD	sudah
87	TiwuGalih	Praya	APBD	sudah
88	Prapen	Praya	APBD	sudah
89	Semayan	Praya	APBD	sudah
90	Gerunung	Praya	APBD	sudah
91	Gonjak	Praya	APBD	sudah
92	Jago	Praya	APBD	sudah
93	Praya	Praya	APBD	sudah
94	Mekar Damai	Praya	APBD	sudah

95	Aik Mual	Praya	APBD	sudah
96	Bunut Baik	Praya	APBD	sudah
97	Montong Terep	Praya	APBD	sudah
98	Muncan	Kopang	APBD	sudah
99	Monggas	Kopang	APBD	sudah
100	Dasan Baru	Kopang	APBD	sudah
101	Semparu	Kopang	APBD	sudah
102	Montong Gamang	Kopang	APBD	sudah
103	Wajageseng	Kopang	APBD	sudah
104	AikBual	Kopang	APBD	sudah
105	Pajangan	Kopang	APBD	sudah
106	Teratak	Batukliang Utara	APBD	sudah
107	AikBerik	Batukliang Utara	APBD	sudah
108	Lantan	Batukliang Utara	APBD	sudah
109	Karang Sidemen	Batukliang Utara	APBD	sudah
110	Tanak Beak	Batukliang Utara	APBD	sudah

DATA DESA YANG BELUM MELAKSANAKAN MUSDES TAHUN 2025

No.	Desa	Kecamatan	Sumber Dana	Ket.
1	Selong Belanak	Praya Barat	APBD	BELUM
2	Banyu Urip	Praya Barat	APBD	BELUM
3	Kateng	Praya Barat	APBD	BELUM
4	Setanggor	Praya Barat	APBD	BELUM
5	Penujak	Praya Barat	APBD	BELUM
6	Batujai	Praya Barat	APBD	BELUM
7	Teruwai	Pujut	APBD	BELUM
8	Sukadana	Pujut	APBD	BELUM
9	Pengengat	Pujut	APBD	BELUM
10	Dadap	Pujut	APBD	BELUM
11	Kerame Jati	Pujut	APBD	BELUM
12	Desa Semoyang	Praya Timur	APBD	BELUM
13	Desa Bilelando	Praya Timur	APBD	BELUM
14	Marong	Praya Timur	APBD	BELUM
15	JeroPuri	Praya Timur	APBD	BELUM
16	Ranggagata	Praya Barat Daya	APBD	BELUM
17	Pandan Indah	Praya Barat Daya	APBD	BELUM
18	Montong Sapah	Praya Barat Daya	APBD	BELUM
19	Teduh	Praya Barat Daya	APBD	BELUM
20	Serage	Praya Barat Daya	APBD	BELUM
21	Selebung Rembiga	Janapria	APBD	BELUM
22	Langko	Janapria	APBD	BELUM
23	Bakan	Janapria	APBD	BELUM
24	Pendem	Janapria	APBD	BELUM
25	Durian	Janapria	APBD	BELUM
26	Kerembong	Janapria	APBD	BELUM
27	Saba	Janapria	APBD	BELUM
28	Lekor	Janapria	APBD	BELUM
29	Janapria	Janapria	APBD	BELUM
30	Jango	Janapria	APBD	BELUM

31	Setuta	Janapria	APBD	BELUM
32	Janggawana	Janapria	APBD	BELUM
33	Tampak Siring	Batukliang	APBD	BELUM
34	Barabali	Batukliang	APBD	BELUM
35	Bujak	Batukliang	APBD	BELUM
36	Mertak Tombok	Praya	APBD	BELUM
37	Darmaji	Kopang	APBD	BELUM
38	Kopang Rembiga	Kopang	APBD	BELUM
39	Lendang Are	Kopang	APBD	BELUM
40	Bebuak	Kopang	APBD	BELUM
41	Berinding	Kopang	APBD	BELUM
42	AikBukak	Batukliang Utara	APBD	BELUM
43	Mas-Mas	Batukliang Utara	APBD	BELUM
44	Setiling	Batukliang Utara	APBD	BELUM

III. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel III. .

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Kebutuhan	Kebutuhan pegawai	Kondisi pegawai	Ket.
Kepala Dinas	1 orang	1 orang	55 PPPK Masih Menunggu SK/SP T untuk Penempatan
Sekretariat	16 orang	16 orang	-
Bidang Pemberdayaan Sosial	12 orang	12 orang	-
Bidang Rehabilitasi Sosial	11 orang	11 orang	-
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pengelolaan Data dan Informasi	11 orang	11 orang	-
Jumlah	51 orang	51 orang	-

Pada Tahun 2025, Kondisi ASN pada Dinas Sosial mengalami penambahan ASN yang cukup signifikan dengan adanya tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik yang penuh waktu sebanyak 9 Orang maupun yang paruh waktu sebanyak 77 Orang ditambah lagi sebelumnya dengan PNS sebanyak 20 Orang sehingga menjadi 106 Orang ASN. Kekurangan pegawai/ASN selama ini dapat terpenuhi atau teratasi yang dampaknya pada pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kab.lombok Tengah lebih optimal.

Untuk Kondisi Aset yang dimiliki, Jumlah Aset pada Dinas Sosial Kondisi 31 Desember 2025 mengalami penyusutan nilai yaitu sebesar Rp. 7.949.166.770,- dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 8.305.053.020,- Adapun aset yang dimiliki Dinas Sosial tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel III KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)**Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025**

No	Jenis Asset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
A.	Aset Tetap	7.949.166.770,00	954
1	KIB A	2.676.900.000,00	4
2	KIB B	2.551.680.200,68	928
3	KIB C	2.660.673.070,00	17
4	KIB D	59.913.500,00	5
5	KIB E	-	-
6	KIB F	-	-
B.	Aset Lainnya	-	-
Jumlah		7.949.166.770,00	954

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.6
Aset Tidak Digunakan Tahun 2025

No	Jenis Asset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
A.	Aset Tetap		
1	KIB A	0	0
2	KIB B	0	0
3	KIB C	0	0
4	KIB D	0	0
5	KIB E	0	0
6	KIB F	0	0
B.	Aset Lainnya		
Jumlah		0	0

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Mengacu pada Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan efisiensi anggaran, telah menyesuaikan anggaran pada program dan kegiatan sebagai berikut :

OPD	Pagu Awal (Murni)/Rp.	Efisiensi					Jumlah Pagu Setelah Pergeseran (Rp.)	BerKurang (Rp.)
		Perjadin	Makmin	ATK	Cetak	Randis		
Dinas Sosial	8.209.171.038,50	177.729.500	61.227.000	1.619.354	6.325.464	468.250.056	7.494.019.664,60	715.151.373,90 (8,71%)

Selain adanya efisiensi diatas, ada juga belanja yang sifatnya Kasustik yaitu Pemulsaan Jenazah Terlantar dan Penjemputan PMI Terlantar, Double Bantuan Hibah Uang kepada Lembaga/Yayasan sehingga tidak bisa direalisasikan, BBM Operasional Pejabat Struktural yang kosong, makan dan minum rapat, perjadin terkait Sekoilah Rakyat(SR), Perpanjangan Pajak Kedaratan Dinas Operasional serta efisiensi dari pengadaan barang dan jasa.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari Aspek Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.20

Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN)	2.731.137.815,39	2.581.325.849,00	98,70
2.	Belanja Publik/Teknis(Belanja Operasi)	5.145.360,00	4.771.288.898,00	96,03
Jumlah		7.876.498.544,39	7.352.614.747,00	93,35

Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Sosial 2025 sebesar 93,35% dari Anggaran Belanja Pegawai(Gaji dan Tunjangan ASN) 98,70% dan Belanja Publik/Teknis(Belanja Operasi) sebesar 96,03 %. Dari Realisasi Anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan Anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 90 %.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III.21

Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2025

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang ditangani	95	96,25	%	Program Rehabilitasi Sosial	100	95,68	%
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	90,65	%
						Program Pemberdayaan Sosial	100	91,90	%
		Persentase penanganan korban bencana	100	100	%	Program Penanganan Bencana	100	99,24	%

Berdasarkan Data dalam Tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2025 untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel III.22

**REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS
SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2025**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU DANA	TARGET		REALISASI					SISA DANA	PERMASALAHAN
				KEUANGAN	FISIK (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	Keu (%)	Fisik (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.525.330.451,39	3.525.330.451,39	100	2.753.587.019	541.579.774	3.295.166.793	93,47	66,00	230.163.658	
1.1.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.909.137	62.909.137	100	58.415.000	1.200.000	59.615.000	94,76	87,00	3.294.137	
1.1.1.	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.524.944	26.524.944	100	23.298.000	-	23.298.000	87,83	87,00	3.226.944	
		BELANJA OPERASI	26.524.944	26.524.944	100	23.298.000	-	23.298.000	87,83	87,00	3.226.944	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	986.406	986.406	100	979.000	-	979.000	99,25	100,00	7.406	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.019.132	5.019.132	100	4.800.000	-	4.800.000	95,63	100,00	219.132	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	285.406	285.406	100	285.000	-	285.000	99,86	100,00	406	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	3.000.000	100	-	-	-	0,00	0,00	3.000.000	Tidak terlaksana karena Laporan telah rampung

		Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000	9.000.000	100	9.000.000	-	9.000.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.234.000	8.234.000	100	8.234.000	-	8.234.000	100,00	100,00	-	
1.1.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.234.798	4.234.798	100	4.233.000	-	4.233.000	99,96	100,00	1.798	
		BELANJA OPERASI	4.234.798	4.234.798	100	4.233.000	-	4.233.000	99,96	100,00	1.798	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	183.000	183.000	100	183.000	-	183.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.266.392	2.266.392	100	2.265.000	-	2.265.000	99,94	100,00	1.392	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	285.406	285.406	100	285.000	-	285.000	99,86	100,00	406	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	1.500.000	100	1.500.000	-	1.500.000	100,00	100,00	-	
1.1.3.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.763.846	3.763.846	100	3.759.000	-	3.759.000	99,87	100,00	4.846	
		BELANJA OPERASI	3.763.846	3.763.846	100	3.759.000	-	3.759.000	99,87	100,00	4.846	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	366.000	366.000	100	366.000	-	366.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.912.440	1.912.440	100	1.908.000	-	1.908.000	99,77	100,00	4.440	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	285.406	285.406	100	285.000	-	285.000	99,86	100,00	406	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	1.200.000	100	1.200.000	-	1.200.000	100,00	100,00	-	

1.1.4.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.999.843	1.999.843	100	1.974.500	-	1.974.500	98,73	100,00	25.343	
		BELANJA OPERASI	1.999.843	1.999.843	100	1.974.500	-	1.974.500	98,73	100,00	25.343	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	122.000	122.000	100	122.000	-	122.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.735.140	1.735.140	100	1.710.000	-	1.710.000	98,55	100,00	25.140	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142.703	142.703	100	142.500	-	142.500	99,86	100,00	203	
1.1.5.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.999.843	1.999.843	100	1.997.000	-	1.997.000	99,86	99,86	2.843	
		BELANJA OPERASI	1.999.843	1.999.843	100	1.997.000	-	1.997.000	99,86	99,86	2.843	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	122.000	122.000	100	122.000	-	122.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.735.140	1.735.140	100	1.732.500	-	1.732.500	99,85	99,85	2.640	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142.703	142.703	100	142.500	-	142.500	99,86	99,86	203	
1.1.6.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.548.805	4.548.805	100	4.532.500	-	4.532.500	99,64	100,00	16.305	
		BELANJA OPERASI	4.548.805	4.548.805	100	4.532.500	-	4.532.500	99,64	100,00	16.305	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	737.250	737.250	100	730.000	-	730.000	99,02	100,00	7.250	

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.948.040	2.948.040	100	2.940.000	-	2.940.000	99,73	100,00	8.040	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.515	713.515	100	712.500	-	712.500	99,86	100,00	1.015	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000	150.000	100	150.000	-	150.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00	-	
1.1.7.	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.217.000	13.217.000	100	12.005.000	1.200.000	13.205.000	99,91	80,00	12.000	
		BELANJA OPERASI	13.217.000	13.217.000	100	12.005.000	1.200.000	13.205.000	99,91	80,00	12.000	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.215.000	1.215.000	100	1.215.000	-	1.215.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000	2.700.000	100	1.500.000	1.200.000	2.700.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Bimbingan Teknis	4.000.000	4.000.000	100	4.000.000	-	4.000.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.302.000	5.302.000	100	5.290.000	-	5.290.000	99,77	100,00	12.000	
1.1.8.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.620.058	6.620.058	100	6.616.000	-	6.616.000	99,94	100,00	4.058	
		BELANJA OPERASI	6.620.058	6.620.058	100	6.616.000	-	6.616.000	99,94	100,00	4.058	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	962.000	962.000	100	962.000	-	962.000	100,00	100,00	-	

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.672.652 285.406	2.672.652 285.406	100 100	2.669.000 285.000	-	2.669.000 285.000	99,86 99,86	100,00 100,00	3.652 406	
		Komputer										
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000	2.700.000	100	2.700.000	-	2.700.000	100,00	100,00	-	
1.2.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.748.480.244,39	2.748.480.244,39	100	2.351.692.018,00	246.962.831,00	2.598.654.849,00	94,55	86,00	149.825.395,39	
1.2.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.731.137.815,39	2.731.137.815,39	100	2.334.363.018,00	246.962.831,00	2.581.325.849,00	94,51	86,00	149.811.966,39	
		BELANJA OPERASI	2.731.137.815,39	2.731.137.815,39	100	2.334.363.018,00	246.962.831,00	2.581.325.849,00	94,51	86,00	149.811.966,39	
		Belanja Gaji Pokok PNS	1.331.871.720	1.331.871.720	100	1.114.864.000	81.014.700	1.195.878.700	89,79	84,00	135.993.020	Sisa Anggaran Gaji Dan Tunjangan
		Belanja Gaji Pokok PPPK	165.402.400	165.402.400	100	142.106.800	23.295.600	165.402.400	100,00	86,00	-	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	136.066.466	136.066.466	100	126.726.646	9.339.820	136.066.466	100,00	93,00	-	
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.224.596	16.224.596	100	14.118.502	2.106.094	16.224.596	100,00	88,00	-	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	95.163.750	95.163.750	100	88.705.000	6.145.000	94.850.000	99,67	93,00	313.750	Sisa Anggaran Gaji Dan Tunjangan
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.400.000	15.400.000	100	14.300.000	1.100.000	15.400.000	100,00	93,00	-	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.275.000	32.275.000	100	30.055.000	2.220.000	32.275.000	100,00	93,00	-	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.230.000	11.230.000	100	9.605.000	1.625.000	11.230.000	100,00	86,00	-	

		Belanja Tunjangan Beras PNS PPh/Tunjangan Khusus PNS	79.849.649	79.849.649	100	66.966.889	6.224.560	71.240.649	100,00	29,00	333.770	Sisa Anggaran Gaji Dan Tunjangan
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	135.898.449	135.898.449	100	11.369.849	1.840.500	135.898.449	100,00	94,00	60,39	Sisa Anggaran Gaji Dan Tunjangan
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.203	1.203	100	1.029	174	1.203	100,00	86,00	-	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	830.149.251	830.149.251	100	710.575.251	106.404.509	816.979.760	98,41	86,00	13.169.491	Sisa Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.737.264	2.737.264	100	2.237.264	498.125	2.735.389	99,93	82,00	1.875	Sisa Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
1.2.2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.742.290	4.742.290	100	4.732.000	-	4.732.000	99,78	100,00	10.290	
		BELANJA OPERASI	4.742.290	4.742.290	100	4.732.000	-	4.732.000	99,78	100,00	10.290	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.708.462	1.708.462	100	1.702.000	-	1.702.000	99,62	100,00	6.462	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.177.610	2.177.610	100	2.175.000	-	2.175.000	99,88	100,00	2.610	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	856.218	856.218	100	855.000	-	855.000	99,86	100,00	1.218	

1.2.3.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan Kantor - Alat/Bahan/Triwulan/Semesteran Bulanan Kantor SKPD	1.998.595 12.600.139	1.998.595 12.600.139	100	1.997.500 12.597.000	-	1.997.500 12.597.000	99,95 99,98	100,00 100,00	3.139	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.525.920 12.600.139	4.525.920 12.600.139	100 100	4.525.500 12.597.000	-	4.525.500 12.597.000	99,99 99,98	100,00 100,00	420 3.139	
		BELANJA OPERASI										
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	100	500.000	-	500.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.141.624	1.141.624	100	1.140.000	-	1.140.000	99,86	100,00	1.624	
		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000	1.200.000	100	1.200.000	-	1.200.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.234.000	3.234.000	100	3.234.000	-	3.234.000	100,00	100,00	-	
1.3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	354.943.473	354.943.473	100	69.309.071	278.577.235	347.886.306	98,01	20,00	7.057.167	
1.3.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332.379.077	332.379.077	100	48.442.000	277.165.235	325.607.235	97,96	15,00	6.771.842	
		BELANJA OPERASI	17.087.930	17.087.930	100	16.577.000	-	16.577.000	97,01	97,00	510.930	
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	879.984	879.984	100	585.000	-	585.000	66,48	100,00	294.984	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.844.200	6.844.200	100	6.840.000	-	6.840.000	99,94	100,00	4.200	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.584.676	3.584.676	100	3.545.000	-	3.545.000	98,89	100,00	39.676	

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Perengkapan Kantor	687.500,00	687.500,00	100,00	687.500,00	-	687.500,00	99,99,00	100,00,00	208	-
		Belanja Lain-lain (Buku, Surat Kabar/Majalah, Alat Listrik)	587.600,00	587.600,00	100,00	587.600,00	-	587.600,00	99,98,84	100,00,00	176	600
		BELANJA MODAL	315.291.147	315.291.147	100	31.865.000	277.165.235	309.030.235	98,01	10,00	6.260.912	
		Belanja Modal Mebel	131.916.257	131.916.257	100	3.890.000	123.935.000	127.825.000	96,90	3,00	4.091.257	Sisa pengadaan kontrak Barang
		Belanja Modal Alat Pendingin	33.287.421	33.287.421	100	12.900.000	20.195.000	33.095.000	99,42	39,00	192.421	Sisa pengadaan kontrak Barang
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.930.705	1.930.705	100	-	850.000	850.000	44,03	0,00	1.080.705	Sisa pengadaan kontrak Barang
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	132.595.650	132.595.650	100	9.975.000	121.818.390	131.793.390	99,39	8,00	802.260	Sisa pengadaan kontrak Barang
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.561.114	15.561.114	100	5.100.000	10.366.845	15.466.845	99,39	33,00	94.269	Sisa pengadaan kontrak Barang
1.3.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.750.000	9.750.000	100	9.750.000	-	9.750.000	100,00	100,00	-	
		BELANJA OPERASI	9.750.000	9.750.000	100	9.750.000	-	9.750.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.750.000	9.750.000	100	9.750.000	-	9.750.000	100,00	100,00	-	
1.3.3.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.762.000	8.762.000	100	8.494.071	-	8.494.071	96,94	100,00	267.929	

1.3.4.	Sub Kegiatan	BELANJA OPERASI Belanja Perbaikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.762.000	8.762.000	100	8.494.071	-	8.494.071	96,94	100,00	267.929	
		Belanja Perjalanan Dinas	4.052.396	4.052.396	100	2.623.000	1.412.000	4.035.000	99,57	65,00	17.396	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.762.000	8.762.000	100	8.494.071	-	8.494.071	96,94	100,00	267.929	Sisa belanja perjalanan dinas
		BELANJA OPERASI Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.052.396	4.052.396	100	2.623.000	1.412.000	4.035.000	99,57	65,00	17.396	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	513.730	513.730	100	512.000	-	512.000	99,66	99,66	1.730	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.453.260	1.453.260	100	1.438.000	-	1.438.000	98,95	100,00	15.260	
			285.406	285.406	100	285.000	-	285.000	99,86	100,00	406	
1.4.	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.696.000	60.696.000	100	55.000.000	5.000.000	60.000.000	98,85	91,00	696.000	
1.4.1.	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.696.000	60.696.000	100	55.000.000	5.000.000	60.000.000	98,85	91,00	696.000	
		BELANJA OPERASI	60.696.000	60.696.000	100	55.000.000	5.000.000	60.000.000	98,85	91,00	696.000	
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	60.696.000	60.696.000	100	55.000.000	5.000.000	60.000.000	98,85	91,00	696.000	Sisa pengadaan kontrak jasa sewa
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00	-	

1.5.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tagihan Air dan Listrik Urusan Pemerintah Daerah	146.658.630	142.500	146.658.630	142.500	100	100	97.245.931	5.950.958	103.426.889	70,30	160,00	43.461.741	-
1.5.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Kelengkapan Listrik dan Listrik	62.664.486	38.112.660	62.664.486	38.112.660	100	100	40.046.431	4.350.958	44.397.389	70,85	64,00	18.267.097	2.871
		BELANJA OPERASI	62.664.486		62.664.486		100		40.046.431	4.350.958	44.397.389	70,85	64,00	18.267.097	
		Belanja													
		Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.409.326		18.409.326		100		10.859.950	985.150	11.845.100	64,34	59,00	6.564.226	
1.5.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.994.144		83.994.144		100		57.199.500	1.600.000	58.799.500	70,00	68,00	25.194.644	
		BELANJA OPERASI	83.994.144		83.994.144		100		57.199.500	1.600.000	58.799.500	70,00	68,00	25.194.644	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.600.000		33.600.000		100		25.600.000	1.600.000	27.200.000	80,95	76,00	6.400.000	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.000.000		24.000.000		100		9.000.000	-	9.000.000	37,50	38,00	15.000.000	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.837.400		11.837.400		100		10.042.657	-	10.042.657	84,84	85,00	1.794.743	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non	14.556.744		14.556.744		100		12.556.843	-	12.556.843	86,26	86,00	1.999.901	

		ASN BELANJA OPERASI	121.539.660	121.539.660	100	92.783.999	3.888.750	96.672.749	79,54	76,00	24.866.911	
1.6.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Petumas	151.642.967	151.642.967	100	121.924.999	3.888.750	125.813.749	82,97	80,00	25.829.218	Sisa BBM yang tidak tereksekusi krn jabatan sekdis
		Penyerahan dan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	69.500.000	69.500.000	100	45.906.000	3.888.750	49.794.750	71,65	66,00	19.705.250	dan 1 kabis yang kosong
1.6.1.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Pajak dan Belanja Pembayaran Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Bea. dan Perizinan Operasional atau Lapangan	121.539.660	121.539.660	100	92.783.999	3.888.750	96.672.749	79,54	76,00	24.866.911	Kendaraan roda 2 banyak rusak berat
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.500.000	35.500.000	100	35.437.000	-	35.437.000	99,82	100,00	63.000	
1.6.2.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000	4.750.000	100	3.880.000	-	3.880.000	81,68	82,00	870.000	
		BELANJA OPERASI	4.750.000	4.750.000	100	3.880.000	-	3.880.000	81,68	82,00	870.000	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.750.000	4.750.000	100	3.880.000	-	3.880.000	81,68	82,00	870.000	
1.6.3.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.353.307	25.353.307	100	25.261.000	-	25.261.000	99,64	100,00	92.307	

Kabupaten/Kota												
2.1.1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Benerbitan Izin Usaha Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	21.853.307	21.853.307	100	100	21.761.000	-	21.761.000	99,58	100,00	92.307
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.468.815	5.468.815	100	100	5.398.700	-	5.398.700	98,72	100,00	70.115
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.500.000	3.500.000	100	100	3.500.000	-	3.500.000	100,00	100,00	-
2.	Program	BELANJA OPERASI Program Pemberdayaan Sosial	5.468.815	5.468.815	100	100	5.398.700	-	5.398.700	98,72	100,00	70.115
			845.946.012,10	845.946.012,10	100	100	777.418.700	-	777.418.700	91,90	92,00	68.527.312
2.1.	Kegiatan	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pengumpulan dan Pelumas Sumbangan dalam Daerah	5.468.815	5.468.815	100	100	5.398.700	-	5.398.700	98,67	100,00	70.115
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	917.400	917.400	100	100	905.200	-	905.200	98,72	100,00	12.200
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	122.000	122.000	100	100	122.000	-	122.000	100,00	100,00	-
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	854.415	854.415	100	100	796.500	-	796.500	93,22	100,00	57.915
		Belanja Sosialisasi	1.575.000	1.575.000	100	100	1.575.000	-	1.575.000	100,00	100,00	-
			2.000.000	2.000.000	100	100	2.000.000	-	2.000.000	100,00	100,00	-
2.2.	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	840.477.197,10	840.477.197,10	100	100	772.020.000	-	772.020.000	91,85	92,00	68.457.197,10

2.2.1.	Sub Kegiatan	Belanja Alat/Bahan untuk Peningkatan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	142.703	142.703	100	142.000	-	142.000	99,51	100,00	703
		BELANJA OPERASI	5.603.503	5.603.503	100	5.602.500	-	5.602.500	99,98	100,00	1.003
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000	2.250.000		2.250.000	-	2.250.000	100,00	100,00	-
		BELANJA OPERASI	5.603.503	5.603.503	100	5.602.500	-	5.602.500	99,98	100,00	1.003
2.2.2.	Sub Kegiatan	Belanja Alat/Bahan untuk Peningkatan Kemampuan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	415.000	415.000	100	415.000	-	415.000	100,00	100,00	-
		BELANJA OPERASI	33.167.864,10	33.167.864,10	100	30.603.500	-	30.603.500	92,27	92,00	2.564.364,10
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	295.800	295.800	100	295.500	-	295.500	99,90	100,00	300
		BELANJA OPERASI	33.167.864,10	33.167.864,10	100	30.603.500	-	30.603.500	92,27	92,00	2.564.364,10
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	888.464,10	888.464	100	825.000	-	825.000	92,86	100,00	63.464
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	839.400	839.400	100	838.500	-	838.500	99,89	100,00	900
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000	1.440.000	100	1.440.000	-	1.440.000	100,00	100,00	-

		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	28.800.000	28.800.000	100	26.400.000	-	26.400.000	91,67	92,00	2.400.000	1 orang TKSK mengundurkan diri
		Belanja Sosialisasi	1.200.000	1.200.000	100	1.100.000	-	1.100.000	91,67	92,00	100.000	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00	-	
2.2.3.	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	801.705.830	801.705.830	100	735.814.000	-	735.814.000	91,78	92,00	65.891.830	

		BELANJA OPERASI	801.705.830	801.705.830	100	735.814.000	-	735.814.000	91,78	92,00	65.891.830	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.265.100	6.265.100	100	2.775.000	-	2.775.000	44,29	44,00	3.490.100	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	415.730	415.730	100	414.000	-	414.000	99,58	100,00	1.730	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.025.000	5.025.000	100	5.025.000	-	5.025.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.800.000	4.800.000	100	2.400.000	-	2.400.000	50,00	50,00	2.400.000	Sisa anggaran tidak tereksekusi krn pengangkatan P3K penuh waktu
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000	200.000	100	200.000	-	200.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Sosialisasi	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	-	5.000.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00	-	
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	780.000.000	780.000.000	100	720.000.000	-	720.000.000	92,31	92,00	60.000.000	2 lembaga penerima hibah tidak terealisasi hibahnya karena tidak terpenuhi syarat pencairan oleh lembaga ybs
3.	Program	Program Rehabilitasi Sosial	1.463.470.387	1.463.470.387	100	1.178.393.622	221.800.000	1.400.193.622	95,68	82,00	63.276.765	
3.1.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	390.858.090	390.858.090	100	385.975.000	-	385.975.000	98,75	100,00	4.883.090	

3.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	111.997.714	111.997.714	100	111.182.000	-	111.182.000	99,27	100,00	815.714	
		BELANJA OPERASI	78.030.151	78.030.151	100	74.791.800	-	74.791.800	95,85	100,00	3.238.351	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.692.216	5.692.216	100	5.675.000	-	5.675.000	99,70	100,00	17.216	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	502.500	502.500	100	502.500	-	502.500	100,00	100,00	-	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	94.402.998	94.402.998	100	93.604.500	-	93.604.500	99,15	100,00	798.498	Sisa pengadaan kontrak B/J
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	2.400.000	100	2.400.000	-	2.400.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000	9.000.000	100	9.000.000	-	9.000.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00	-	
3.1.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Sandang	7.260.590	7.260.590	100	7.037.000	-	7.037.000	96,92	100,00	223.590	
		BELANJA OPERASI	7.260.590	7.260.590	100	7.037.000	-	7.037.000	96,92	100,00	223.590	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.260.590	7.260.590	100	7.037.000	-	7.037.000	96,92	100,00	223.590	Sisa pengadaan kontrak B/J
3.1.3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu	78.030.151	78.030.151	100	74.791.800	-	74.791.800	95,85	100,00	3.238.351	

		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.764.159	2.764.159	100	2.752.800	-	2.752.800	99,59	100,00	11.359	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	414.300	414.300	100	414.000	-	414.000	99,93	100,00	300	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	74.641.692	74.641.692	100	71.445.000	-	71.445.000	95,72	100,00	3.196.692	Sisa pengadaan kontrak B/J
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.000	210.000	100	180.000	-	180.000	85,71	100,00	30.000	
3.1.4.	Sub Kegiatan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	183.580.091	183.580.091	100	182.979.400	-	182.979.400	99,67	100,00	600.691	
		BELANJA OPERASI	183.580.091	183.580.091	100	182.979.400	-	182.979.400	99,67	100,00	600.691	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.633.306	9.633.306	100	9.606.400	-	9.606.400	99,72	100,00	26.906	
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.300.527	10.300.527	100	9.900.000	-	9.900.000	96,11	100,00	400.527	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.271.676	1.271.676	100	1.268.000	-	1.268.000	99,71	100,00	3.676	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.218.312	1.218.312	100	1.200.000	-	1.200.000	98,50	100,00	18.312	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.000	350.000	100	350.000	-	350.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	123.101.270	123.101.270	100	122.950.000	-	122.950.000	99,88	100,00	151.270	

		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.925.000	11.925.000	100	11.925.000	-	11.925.000	100,00	100,00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.500.000	13.500.000	100	13.500.000	-	13.500.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.500.000	1.500.000	100	1.500.000	-	1.500.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Sosialisasi	8.750.000	8.750.000	100	8.750.000	-	8.750.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.030.000	2.030.000	100	2.030.000	-	2.030.000	100,00	100,00	-	
3.1.5.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9.989.544	9.989.544	100	9.984.800	-	9.984.800	99,95	100,00	4.744	
		BELANJA OPERASI	9.989.544	9.989.544	100	9.984.800	-	9.984.800	99,95	100,00	4.744	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.989.544	4.989.544	100	4.984.800	-	4.984.800	99,90	100,00	4.744	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	-	5.000.000	100,00	100,00	-	

3.2.	Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.072.612.297	1.072.612.297	100	792.418.622	221.800.000	1.014.218.622	94,56	74,00	58.393.675	
3.2.1.	Sub Kegiatan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	673.138.839	673.138.839	100	454.387.600	216.800.000	671.187.600	99,71	68,00	1.951.239	
		BELANJA OPERASI	673.138.839	673.138.839	100	454.387.600	216.800.000	671.187.600	99,71	68,00	1.951.239	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.251.000	1.251.000	100	1.161.600	-	1.161.600	92,85	100,00	89.400	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	659.730	659.730	100	-	-	-	0,00	0,00	659.730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	428.109	428.109	100	426.000	-	426.000	99,51	100,00	2.109	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	14.400.000	100	14.400.000	-	14.400.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.600.000	9.600.000	100	7.200.000	1.200.000	8.400.000	87,50	87,50	1.200.000	Sisa anggaran tidak tereksekusi krn pengangkatan P3K penuh waktu
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	646.800.000	646.800.000	100	431.200.000	215.600.000	646.800.000	100,00	67,00	-	
3.2.2.	Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan	263.135.318	263.135.318	100	259.909.500	-	259.909.500	98,77	100,00	3.225.818	
		BELANJA OPERASI	263.135.318	263.135.318	100	259.909.500	-	259.909.500	98,77	100,00	3.225.818	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.945.389	7.945.389	100	7.887.000	-	7.887.000	99,27	100,00	58.389	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	1.429.055	1.429.055	100	1.423.000	-	1.423.000	99,58	100,00	6.055	

		Tulis Kantor										
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.461.932	2.461.932	100	2.457.500	-	2.457.500	99,82	100,00	4.432	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	100	500.000	-	500.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.349.192	1.349.192	100	1.346.000	-	1.346.000	99,76	100,00	3.192	
		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	240.260.530	240.260.530	100	237.109.000	-	237.109.000	98,69	100,00	3.151.530	Sisa pengadaan kontrak B/J
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000	2.700.000	100	2.700.000	-	2.700.000	100,00	100,00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700.000	700.000	100	700.000	-	700.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000	100.000	100	100.000	-	100.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	389.220	389.220	100	387.000	-	387.000	99,43	100,00	2.220	
		Belanja Sosialisasi	2.500.000	2.500.000	100	2.500.000	-	2.500.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.800.000	2.800.000	100	2.800.000	-	2.800.000	100,00	100,00	-	
3.2.3.	Sub Kegiatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	136.338.140	136.338.140	100	78.121.522	5.000.000	83.121.522	60,97	57,00	53.216.618	
		BELANJA OPERASI	136.338.140	136.338.140	100	78.121.522	5.000.000	83.121.522	60,97	57,00	53.216.618	

		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.418.491	24.418.491	100	24.374.400	-	24.374.400	99,82	100,00	44.091	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	412.649	412.649	100	410.000	-	410.000	99,36	100,00	2.649	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.581.000	7.581.000	100	7.579.500	-	7.579.500	99,98	100,00	1.500	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.800.000	40.800.000	100	-	-	-	0,00	0,00	40.800.000	tidak tereksekusi krn ketrbatasan waktu
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.000.000	8.000.000	100	8.000.000	-	8.000.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.500.000	2.500.000	100	-	-	-	0,00	0,00	2.500.000	Tidak ada kasus yang terjadi (jasa pemulasaraan jenazah)
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	25.290.000	25.290.000	100	20.000.000	5.000.000	25.000.000	98,85	79,00	290.000	Sisa pengadaan kontrak B/J
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.336.000	27.336.000	100	17.757.622	-	17.757.622	64,96	65,00	9.578.378	Sisa anggaran belanja B/J
4.	Program	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.709.333.309	1.709.333.309	100	743.449.112	806.109.500	1.549.558.612	90,65	44,00	159.774.697	
4.1.	Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.709.333.309	1.709.333.309	100	743.449.112	806.109.500	1.549.558.612	90,65	44,00	159.774.697	
4.1.1.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	657.952.438	657.952.438	100	522.816.600	132.560.000	655.376.600	99,61	80,00	2.575.838	
		BELANJA OPERASI	657.952.438	657.952.438	100	522.816.600	132.560.000	655.376.600	99,61	80,00	2.575.838	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.688.301	9.688.301	100	9.675.100	-	9.675.100	99,86	100,00	13.201	

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	702.730	702.730	100	683.000	-	683.000	97,19	100,00	19.730	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.288.704	1.288.704	100	1.288.500	-	1.288.500	99,98	100,00	204	Sisa anggaran tidak terekseskusi
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	19.200.000	19.200.000	100	14.800.000	2.000.000	16.800.000	87,50	77,00	2.400.000	krn pengangkatan P3K penuh waktu
		Belanja Komputer	142.703	142.703	100	-	-	-	0,00	0,00	142.703	
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan	554.400.000	554.400.000	100	462.000.000	92.400.000	554.400.000	100,00	83,00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.740.000	52.740.000	100	14.580.000	38.160.000	52.740.000	100,00	28,00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000	200.000	100	200.000	-	200.000	100,00	100,00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.990.000	3.990.000	100	3.990.000	-	3.990.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Sosialisasi	15.600.000	15.600.000	100	15.600.000	-	15.600.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00	-	
4.1.2.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.026.357.327	1.026.357.327	100	199.702.412	670.849.500	870.551.912	84,82	20,00	155.805.415	
		BELANJA OPERASI	1.026.357.327	1.026.357.327	100	199.702.412	670.849.500	870.551.912	84,82	20,00	155.805.415	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.250.765	42.250.765	100	30.540.200	7.879.500	38.419.700	90,93	72,00	3.831.065	Tidak terealisasi krn pekerjaan sudah selesai dikerjakan

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.248.382	2.248.382	100	2.248.382	-	2.248.382	100,00	100,00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.819.368	16.819.368	100	12.319.368	-	12.319.368	73,25	73,00	4.500.000	Tidak terealisasi krn pekerjaan sudah selesai dikerjakan
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	100	500.000	-	500.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	570.812	570.812	100	-	-	-	0,00	0,00	570.812	Tidak terealisasi krn pekerjaan sudah selesai dikerjakan
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.285.000	66.285.000	100	31.755.000	30.330.000	62.085.000	93,66	48,00	4.200.000	Tidak terealisasi krn pekerjaan sudah selesai dikerjakan
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.835.000	16.835.000	100	16.835.000	-	16.835.000	100,00	100,00	-	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000	33.000.000	100	33.000.000	-	33.000.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.800.000	4.800.000	100	2.000.000	-	2.000.000	41,67	42,00	2.800.000	Sisa anggaran tidak tereksekusi krn pengangkatan P3K penuh waktu
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.400.000	1.400.000	100	1.100.000	-	1.100.000	78,57	79,00	300.000	Tidak terealisasi krn pekerjaan sudah selesai dikerjakan
		Belanja Sosialisasi	53.400.000	53.400.000	100	50.200.000	-	50.200.000	94,01	94,00	3.200.000	Sisa anggaran uang transport peserta yang tidak hadir pd kegiatan

		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.078.000	16.078.000	100	16.054.462	-	16.054.462	99,85	100,00	23.538	Tidak terealisasi karena penerima BLT tidak memenuhi syarat,
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada	756.000.000	756.000.000	100	-	626.400.000	626.400.000	82,86	82,86	129.600.000	Tidak terealisasi karena penerima BLT tidak memenuhi syarat,
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.170.000	16.170.000	100	3.150.000	6.240.000	9.390.000	58,07	23,00	6.780.000	Tidak terealisasi karena penerima BLT tidak memenuhi syarat,
4.1.3.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	25.023.544	25.023.544	100	20.930.100	2.700.000	23.630.100	94,43	84,00	1.393.444	
		BELANJA OPERASI	25.023.544	25.023.544	100	20.930.100	2.700.000	23.630.100	94,43	84,00	1.393.444	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.477.544	3.477.544	100	2.084.100	-	2.084.100	59,93	60,00	1.393.444	Sisa anggaran BBM yang tidak terpakai krn kegiatan telah dikerjakan

		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	396.000	396.000	100	396.000	-	396.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000	450.000	100	450.000	-	450.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000	2.700.000	100		2.700.000	2.700.000	100,00	100,00	-	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000	18.000.000	100	18.000.000	-	18.000.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	100		-	-	0,00	0,00	-	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	100		-	-	0,00	0,00	-	

5.	Program	Program Penanganan Bencana	170.727.670	170.727.670	100	151.431.900	18.000.000	169.431.900	99,24	90,00	1.295.770	
5.1.	Kegiatan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	139.992.316	139.992.316	100	121.316.000	18.000.000	139.316.000	99,52	87,00	676.316	
5.1.1.	Sub Kegiatan	Penyediaan Makanan	139.992.316	139.992.316	100	121.316.000	18.000.000	139.316.000	99,52	87,00	676.316	
		BELANJA OPERASI	139.992.316	139.992.316	100	121.316.000	18.000.000	139.316.000	99,52	87,00	676.316	
		Belanja Natura dan Pakan-Natura	99.992.316	99.992.316	100	99.316.000	-	99.316.000	99,32	100,00	676.316	Sisa pengadaan kontrak B/J
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40.000.000	40.000.000	100	22.000.000	18.000.000	40.000.000	100,00	100,00	-	
5.2.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	30.735.354	30.735.354	100	30.115.900	-	30.115.900	97,98	100,00	619.454	
5.2.1	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	30.735.354	30.735.354	100	30.115.900	-	30.115.900	97,98	100,00	619.454	
		BELANJA OPERASI	30.735.354	30.735.354	100	30.115.900	-	30.115.900	97,98	100,00	619.454	
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.189.250	2.189.250	100	2.175.900	-	2.175.900	99,39	100,00	13.350	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	406.104	406.104	100	400.000	-	400.000	98,50	100,00	6.104	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.910.000	8.910.000	100	8.910.000	-	8.910.000	100,00	100,00	-	
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.330.000	1.330.000	100	1.330.000	-	1.330.000	100,00	100,00	-	

		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.600.000	9.600.000	100	9.000.000	-	9.000.000	93,75	100,00	600.000	
		Belanja Sosialisasi	8.300.000	8.300.000	100	8.300.000	-	8.300.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.827.468	1.827.468	100	1.800.000	-	1.800.000	98,50	100,00	27.468	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	176.624	176.624	100	175.500	-	175.500	99,36	100,00	1.124	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.900.000	1.900.000	100	1.900.000	-	1.900.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.655.000	2.655.000	100	2.655.000	-	2.655.000	100,00	100,00	-	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.249.650	3.249.650	100	3.200.000	-	3.200.000	98,47	100,00	49.650	
		JUMLAH	7.876.498.544,49	7.876.498.544,49	100,00	5.765.125.473,00	1.587.489.274,00	7.352.614.747,00	93,35	74,00	523.883.797,49	

DINAS SOSIAL LOTENG

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (Good Governance).

Secara umum pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan baik dari sisi SDM maupun Teknis pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan baik dalam keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra, Dokumen Renja dan DPA Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, sehingga Target Kinerja dapat dicapai sesuai dengan harapan.

IV.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang sistem penentuan Indikator Pelaporan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif kepada Aparatur.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan SDM Aparatur Dinas Sosial kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial sehingga dapat menghasilkan program yang tepat, terarah dan berkualitas.
3. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana penunjang untuk melakukan penjangkauan kepada Pemerlu Pelayanan Kejahteraan Sosial(PPKS) sehingga pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial lebih optimal dalam pencapaian kinerja.

Demikian beberapa hal yang perlu disarankan agar kualitas penerapan SAKIP dalam kerangka penerapan good governance meningkat dan mampu memenuhi tuntutan publik akan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



H. MASNUN, S.Pd.M.Pd.
NIP. 19681231 199302 1 013

DINAS SOSIAL LOTENG